IMPLEMENTASI PEMIKIRAN M. NATSIR TENTANG ISLAM DAN NEGARA DALAM PARTAI BULAN BINTANG

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S1)

OLEH:

IMAM JUNAEDY
NIM: CO2303049

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 050 57
No REG : S-2010/57/050
ASAL BUKU :
TANGGAL :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
SURABAYA
2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Imam Junaedy (C02303049) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juli 2010

Pembimbing

H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si
NIP. 197311171998031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Imam Junaedy ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si	Siti Musfiqoh, M.EI
NIP. 197311171998031003	NIP. 197608132006042002

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing
Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag	H. Ah. Fajruddin Fatwa, SH., M.Hi	H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.S
NIP. 195808121991031001	NIP. 197606132003121002	NIP. 197311171998031003

Surabaya, 05 Agustus 2010
Mengesahkan, Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq M.Ag,
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Junaedy
Nim : C0 2303049
Semester : XIV
Jurusan : Siyasah Jinayah
Fakultas : Syariah
Alamat : Desa Jangkar Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PEMIKIRAN M. NATSIR TENTANG ISLAM DAN NEGARA DALAM PARTAI BULAN BINTANG"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 28 Juli 2010

METERAI TEMPEL
754BCAAF142967881
ENAM RIBU RUPIAH
6000

Imam Junaedy
C0 2303049

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini Berjudul "**Implementasi Pemikiran M. Natsir Tentang Islam Dan Negara Dalam Partai Bulan Bintang**" adalah hasil penelitan kepustakaan *(library research)* untuk menjawab rumusan permasalahan yaitu bagaimanakah relasi Islam dan Negara menurut pemikiran M. Natsir dan bagaimanakah implementasi pemikiran M. Natsir dalam Partai Bulan Bintang?

Mengingat kajian yang dilakukan bersifat literer, maka metode yang dipakai dalam pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis dengan teknik *Deskriptif Analisis* dengan pola pikir *Deduktif* yakni untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengamatan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi Islam dan negara adalah mutlak tidak dapat dipisahkan, karena agama di dalamnya mengatur semua aspek kehidupan manusia yang sempurna termasuk masalah politik dan kenegaraan. Sedangkan konsep pemikiran Muhammad Natsir yang diimplementasikan oleh Partai Bulan Bintang adalah pandangan bahwa ajaran Islam sebagai pedoman hidup dan penerapan fungsi Negara sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan atas kesimpulan diatas, maka kiranya ada beberapa saran yang sekiranya perlu disampaikan, yaitu *pertama*, kepada para akademisi supaya mengembangkan penelitain ini untuk menambah khazanah pengetahuan. *Kedua*, kepada para kader dan politisi Partai Bulan Bintang supaya menerapkan konsep pemikiran politik M. Natsir dalam kehidupan kongkrit berbangsa dan bernegara guna membangun dan mewujudkan demokrasi sejati di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAKSI iv

KATA PENGANTAR v

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 9

E. Kegunaan Penelitian 9

F. Definisi Operasional 10

G. Metode Penelitian 11

H. Sistematika Pembahasan 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II ISLAM DAN NEGARA DALAM PANDANGAN M. NATSIR ... 15

A. Biografi M. Natsir 15

1. Riwayat Hidup 15

2. M. Natsir Dalam Dunia Politik 19

3. Karya-karya M. Natsir 23

B. Islam dan Negara Menurut M. Natsir 25

1. Islam sebagai pedoman hidup 25

2. Islam sebagai Ideologi 27

3. Negara Adalah Alat 32

4. Islam dan Negara Dalam Pandangan M. Natsir..... 41

BAB III ISLAM DAN NEGARA DALAM PANDANGAN PARTAI BULAN BINTANG 44

A. Latar Belakang Berdirinya Partai Bulan Bintang 44

B. Khittah Perjuangan Partai Bulan Bintang 49

1. Asas dan Tujuan 49

2. Visi dan Misi 53

3. Platform Partai 55

C. Islam dan Negara Menurut Partai Bulan Bintang 58

1. Islam Sebagai Pedoman Hidup 58

2. Negara Adalah Alat Untuk Mencapai Tujuan 63

3. Islam Dan Negara Dalam Pandangan PBB 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV Analisis Data **68**

A. Analisis terhadap Pemikiran M. Natsir tentang Islam dan Negara 68

B. Analisis terhadap Pandangan Partai Bulan Bintang tentang Islam dan Negara 71

BAB V Penutup **75**

A. Kesimpulan 75

B. Saran 75

Daftar Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan negara dan agama merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli sampai saat ini. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menerjemahkan agama sebagai bagian dari negara atau negara merupakan bagian dari dogma agama. Karena pada hakekatnya, negara sendiri secara umum diartikan sebagai suatu persekutuan hidup bersama sebagai sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Oleh karena itu, sifat dasar manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horisontal dalam hubungan manusia satu dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara memiliki sebab-akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri.[1]

Dalam hal ini, perlu disadari bahwa manusia sebagai warga negara adalah juga mahluk sosial dan mahluk Tuhan. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebebasan untuk memenuhi dan memanifestasikan kodrat

---

[1] Dede Rosyada, *Pendidikan Kewargaan* (*Civic Education: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*), Jakarta: ICCE Syarif Hidayatullah, 2003, 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanusiaannya. Namun, sebagai makhluk Tuhan, manusia juga mempunyai kewajiban untuk mengabdi kepada-Nya dalam bentuk penyembahan atau ibadah yang diajarkan oleh agama atau keyakinan yang dianutnya. Hal-hal yang berkaitan dengan negara adalah manifestasi dari kesepakatan manusia. Sedangkan hubungan dengan Tuhan yang tertuang dalam ajaran agama adalah wahyu dari Tuhan. Oleh karena itu, ada benang emas yang menghubungkan antara negara dengan agama.[2]

Meskipun demikian, konsep hubungan agama dan negara sangat ditentukan pemikiran manusia masing-masing. Dan, keyakinan manusia sangat mempengaruhi konsep hubungan negara dan agama dalam kehidupan manusia.

Sedangkan yang menjadi permasalahan sampai sekarang ini belum kunjung tuntas adalah bagaimana bentuk negara ideal dan yang dapat melaksanakan tujuannya itu. Karena melihat pelaksanaan negara selama ini belum menampakkan formulasi idealnya suatu negara yang dicita-citakan, hal ini karena konsep negara yang masih mengambang dan berimplikasi pada pelaksanaan negara.

Pencarian konsep tentang negara merupakan salah satu isu yang sentral dalam pemikiran politik terutama di Indonesia. Sementara itu, pemikiran politik Islam sesungguhnya merefleksikan upaya pencarian landasan intelektual bagi

---

[2] A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewargaan*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000, 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peranan negara dalam memenuhi kepentingan-kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemikiran para ulama' dalam pencarian konsep tentang agama, sebenarnya mengandung dua maksud. Pertama, untuk menemukan idealitas Islam tentang negara bertolak dari asumsi bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang negara. Kedua, untuk melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara, hal ini didasarkan pada anggapan bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu tentang negara, tetapi hanya menawarkan prinsip-prinsip dasar berupa etika dan moral.[3]

Sedangkan berdasarkan konteks sejarah pasca kemerdekaan RI, para pemikir politik muslim di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok. *Pertama,* kelompok yang ingin mendirikan negara Islam (seperti gerakan Kartosuwiryo dengan Darul Islamnya) yang kemudian disebut sebagai kaum fundamentalis Islam. *Kedua,* kelompok yang terdiri dari orang-orang priyayi yang tidak memperkenankan peranan agama Islam dalam sebuah negara, yang mana hal ini akan mengarah pada bentuk negara sekuler atau identik dengan kaum liberal. *Ketiga,* kelompok yang tidak ingin Islam sebagai ideologi sebuah negara, akan tetapi mereka menghendaki adanya nilai Islam (nilai moral agama) dalam hal kenegaraan sebagai suatu hal yang dominan, atau yang lebih dikenal dengan kaum moderat. Di antara kelompok ini adalah organisasi NU dan

---

[3] M. Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam" dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan,* Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, 43 – 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah yang secara relatif memandang moderat dalam melihat hubungan antara agama dan negara.

Dalam kaitannya dengan masalah tersebut, M. Natsir dapat dikategorikan pada kelompok yang ketiga. Dalam hal ini, M. Natsir adalah tokoh dan pemikir Islam, terutama dibidang yang berkaitan dengan topik pembahasan ini. M. Natsir berpendapat bahwa Islam sebagai agama mayoritas rakyat Indonesia, cukup mempunyai akar dalam masyarakat, sehingga mempunyai alasan yang kuat untuk dijadikan dasar negara. Ajaran Islam mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan dapat menjamin keragaman hidup berbagai golongan dalam negara dengan penuh toleransi.[4] Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an:

لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ
فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya : *" Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Al-Baqarah: 256)*[5]

Realisasi persatuan dari ke-bhinneka-an, pemerintah mewujudkannya dalam satu wadah yang kuat, yang kemudian dimanifestasikan dalam bentuk

---

[4] Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam,* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003, 214.

[5] Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia,* Jakarta: PT. Sari Agung, 2002, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar negara yakni Pancasila, terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Persatuan Indonesia. Dan dalam sila-sila ini dapat dilihat bahwa negara sangat menjunjung tinggi agama (*theisme*) sebagai dasar terbentuknya negara. Karena itu, jika keberagaman tersebut tidak disatukan dalam upaya membentuk suatu kesamaan keyakinan untuk hidup bersama dalam satu negara, maka yang terjadi adalah konflik berkepanjangan yang akan menghambat terbentuknya suatu negara yang adil dan makmur.

Dalam menyikapi kondisi tersebut, Natsir kemudian mengemukakan gagasannya bahwa Pancasila bukanlah sesuatu yang asing bagi Islam sejauh ia ditafsirkan sesuai dengan asas-asas keyakinan agama itu. Sebaliknya, ia akan menjadi asing jika ditafsirkan dengan cara-cara yang tidak cocok. Namun, beliau mengingatkan bahwa betapapun terdapat kesesuaian antara Pancasila dengan Islam, tidaklah berarti bahwa Pancasila adalah Islam atau Islam adalah Pancasila. Keduanya tetap berbeda. Islam, menurut Natsir lebih luas daripada lima sila dalam Pancasila itu. Lima sila itu hanyalah menggambarkan sebagian dari ajaran Islam.[6]

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, Natsir membenarkan bahwa Islam bersifat demokratis, tetapi sama sekali tidak berarti bahwa semua hal, termasuk hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Islam, masih perlu dikukuhkan atau ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemungutan suara. Atau

---

[6] Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam,* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003, 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perkataan lain permusyawaratan itu hanya terbatas pada hal-hal yang belum ditetapkan hukumnya, dan mencari cara yang terbaik untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan.[7]

Dalam proses awal pembentukan negara Indonesia persoalan yang paling krusial adalah menyepakati dasar negara. Seperti pada saat sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) permasalahan pokok yang diperdebatkan terutama oleh dua tokoh dalam dua kubu, yakni Soekarno sebagai pemikir kelompok nasionalis sekuler dan Muhammad Natsir dengan kelompok Islam politik adalah persoalan bentuk negara, dasar falsafah negara dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan suatu konstitusi.

Sedangkan situasi politik Indonesia setelah turunnya Soeharto hampir sama dengan keadaan awal kemerdekaan di tahun 1945. Masyarakat, sebagai warga negara beramai-ramai mengemukakan aspirasi sebesar-besarnya dengan cara mendirikan partai politik sebagai wadahnya. Pada masa awal kemerdekaan para tokoh pembaharu politik Islam termasuk M. Natsir mendirikan partai Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia) yang memiliki langgam gerak perjuangannya adalah mengedepankan nilai-nilai Islami dalam setiap praktek berpolitik. Masyumi lahir sebagai sebuah partai poltik yang berwawasan modern

[7] Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara,* Jakarta: UI Press, 1990, 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan berjuang demi sebuah *modern nation-state,* serta mempunyai cita-cita demokrasi barat ketimbang partai-partai lainnya.[8]

Pada tahun 1998 setelah turunnya kekuasaan otoriter Soeharto dengan Orde Barunya juga telah banyak membawa perubahan warna politik Indonesia. Salah satu partai politik yang terbentuk pada saat itu dan disinyalir sebagai penerus dari perjuangan Masyumi adalah Partai Bulan Bintang (PBB). Partai yang ranah perjuangannya mengusung nilai-nilai Islami. PBB didirikan dengan dilandasi niat membangun bangsa dan negara bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama maupun golongan sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, serta berpegang pada prinsip bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam.

Perjuangan untuk menegakkan suatu sistem yang kuat dalam sebuah negara menjadi *trade mark* Partai Bulan Bintang sejak digelindingkannya pada awal musim reformasi politik. Diantara partai-partai baru yang bertebaran setelah Soeharto terdepak dari tampuk kekuasaan, PBB mempunyai ciri khas tersendiri. Lahirnya partai-partai baru karena dorongan eforia politik yang muncul seiring dengan berseminya era reformasi, namun PBB mempunyai perjalanan sejarah yang lebih panjang ke masa kejayaan Orde Baru. Karena banyak persamaan bentuk gerak politik PBB dengan Masyumi, Terutama Azas

---

[8] Musa Kazhim dan Alfia Hamzah, *5 Partai Dalam Timbangan: Analisis dan Prospek,* Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, hal. 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan landasan perjuangan politiknya yang merupakan manifestasi dari cara pandang partai ini terhadap persoalan agama dan negara.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi berbagai masalah, adalah sebagai berikut :

a. Pandangan M. Natsir terhadap persoalan Islam dan Negara
b. Pandangan Partai Bulan Bintang terhadap persoalan Islam dan Negara
c. Relasi Islam dan Negara menurut M. Natsir
d. Relasi Islam dan Negara menurut Partai Bulan Bintang
e. Implementasi Islam dan Negara terhadap Partai Bulan Bintang

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, penulis akan memberi batasan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini, yakni relasi Islam dan negara dalam pandangan M. Natsir dan implementasi pemikiran M.Natsir tentang Islam dan Negara dalam Partai Bulan Bintang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan pokok masalah yang penulis kemukakan di atas, maka skripsi yang berjudul "Implementasi pemikiran M.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Natsir tentang Islam dan Negara dalam Partai Bulan Bintang" akan penulis batasi dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah relasi Islam dan Negara menurut pemikiran M. Natsir?
2. Bagaimanakah implementasi pemikiran M. Natsir dalam Partai Bulan Bintang?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Memberikan penjelasan tentang pemikiran M. Natsir atas relasi Islam dan negara.
2. Mendeskripsikan implementasi pemikiran M. Natsir tentang Islam dan Negara dalam Partai Bulan Bintang.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian, penulis mengharapkan manfaat dan kegunaan dari penelitian ini, sekurang-kurangnya dapat bermanfaat :

1. Memperkaya khazanah pengetahuan atas implementasi pemikiran M. Natsir tentang Islam dan Negara dalam Partai Bulan Bintang pada penulis khususnya dan pada seluruh pembaca pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dijadikan hipotesa penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemikiran M. Natsir tentang Islam dan Negara.
3. Kepentingan ilmu pengetahuan baik tertulis maupun praktis, melalui penelitian ilmiah.

F. Definisi Operasional

Sebelum mendeskripsikan lebih jauh mengenai penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan *"Implementasi Pemikiran M. Natsir Tentang Islam dan Negara dalam Partai Bulan Bintang"* dengan mendefinisikan setiap kosa kata pada masing-masing kata yang menyusun tema tersebut:

Implementasi	: Pelaksanaan.
Pemikiran	: Pikiran adalah hasil berpikir, sedangkan pemikiran adalah proses, cara atau hasil berpikir.
Negara	: Organisasi teritorial suatu bangsa yang memiliki kedaulatan.[9]
Partai Bulan Bintang	: Nama salah satu partai politik di Indonesia

[9] A. Ubaidillah, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000, 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian literer yaitu suatu penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji data dari sumber-sumber data primer dan data sekunder maka penulis mempergunakan literatur-literatur yang relevan dengan tujuan dalam pembahasan skripsi tersebut.

2. Sumber Data

   Sumber Data yang penulis pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

   a. Sumber data primer (utama):

      1) M. Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 2001)
      2) Musa Kazhim dan Alfia Hamzah, *5 Partai Dalam Timbangan: Analisis dan Prospek,* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999)
      3) Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, *Hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang,* Jakarta, 2005
      4) M. Natsir, *Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah,* (Jakarta: Giri Mukti Pasaka, 1988).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Thohir Luth, *M. Natsri, Dakwah Dan Pemikirannya* (Jakarta: Gema Insani, 1999)

b. Sumber data sekunder (pendukung):

Yaitu data yang diambil diperoleh dari bahan pustaka yang terkait dengan pembahasan ini sebagai berikut:

1) A. Syafii Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan,* (Jakarta: LP3ES, 1985)
2) Deliar Noer, *Gerakan Modern Islamdi Indonesia 1900-1942,* (Jakarta: LP3ES, 1982)
3) Deliar Noer, *Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa,* (Bandung: Mizan, 2001)
4) Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir,* (Jakarta: Teraju, 2002)
5) Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern Dan Postmodern Islam,* (Jakarta: Grasido, 2003)
6) Sahar L. Hasan, Kuat Sukardiono, Dadi MH, *Memilih Partai Islam Visi, Misi Dan Persepsi,* (Jakarta: Gema Insani, 1998)
7) Yusuf, A. Puar, *M. Natsir 70 Tahun Kenang-Kenangan Kehidupan dan Perjuangan,* (Jakarta: Antara, 1978)
8) Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942,* (Jakarta: LP3ES, 1996)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Kholid Novianto Al Chaidar, *Era Baru: Sosialisasi Pemikiran Amin Rais, Hamzah Haz, Matori Abdul Jalil, Nurmahmudi, Yuzril Ihza Mahendra,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat kajian yang dilakukan bersifat literer, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu buku-buku yang membicarakan tema-tema pokok bahasan secara langsung memperoleh data yang detail kemudian melakukan *Teknik Organizing* yaitu mengambil pokok-pokok yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah Metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber atau literatur yang diperoleh sebelumnya, dan selanjutnya digunakan pola pikir *Deduktif* yaitu cara yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

H. Sistematika Pembahasan

Dalam suatu karya ilmiah perlu adanya sistematika pembahasan agar pembaca dapat lebih mudah untuk memahami dan mengerti tentang pembahasan yang dimaksud. Adapun pembahasan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Islam dan Negara dalam pandangan M. Natsir yang meliputi: Biografi M. Natsir, pergulatannya dalam perpolitikan Indonesia, serta Islam dan Negara menurut Pandangan M. Natsir.

Bab III : Berisi tentang Islam dan Negara dalam pandangan Partai Bulan Bintang yang meliputi: latar belakang berdirinya Partai Bulan Bintang, visi dan misi serta Azas perjuangan Partai Bulan Bintang, platform Partai Bulan Bintang serta Islam dan Negara dalam pandangan Partai Bulan Bintang

Bab IV : Pembahasan mengenai analisis pemikiran M. Natsir tentang Islam dan Negara yang diterapkan oleh Partai Bulan Bintang.

Bab V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang ditarik pada bab-bab sebelumnya, serta berisi saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

ISLAM DAN NEGARA DALAM PANDANGAN M. NATSIR

A. Biografi M. Natsir

1. Riwayat Hidup

a. Latar Belakang Keluarga

Muhammad Natsir dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 17 Jumadil Akhir 1326 H bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1908. Di sebuah desa bagian barat Indonesia, terkenal dengan kultur agama Islam yang kental dalam kehidupan sosialnya. Desa Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat. Ibunya bernama Khadijah, sedangkan ayahnya bernama Mohammad Idris dengan gelar Sutan Saripado. Ayahnya adalah seorang pegawai rendahan sebagai juru tulis dikantor kontroler di Maninjau yang kemudian menjadi sipir di Bekeru (Sulawesi Selatan). Adapun gelar yang diberikan kepada Natsir adalah Datok Sinaro Panjang, gelar pusaka diberikan kepada Natsir setelah menikah dengan Nurnahar pada tanggal 20 Oktober 1934. Gelar tersebut merupakan gelar adat yang diberikan kepada seseorang setelah menikah dan berlaku secara turun temuprun.[1]

---

[1] Yusuf, A. Puar, *M. Natsir 70 Tahun Kenang – Kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, Jakarta: Antara, 1978, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Natsir mempunyai tiga orang saudara yaitu Yukinan, Ruhiah dan Yohanusun. Sosialisasi keagamaan dan intelektual Natsir banyak dilalui dikampung halamannya.

Jarak Solok ke Padang memang tidak begitu jauh, tetapi ini membuat Natsir untuk hidup mandiri dikarenakan telah berpisah dengan keluarga. Hari-hari pertama dia menjalaninya cukup membuat kelelahan, memasak sendiri, mencuci pakaian dan mencari kayu bakar. Kemandirian inilah yang membuat Natsir memiliki kesederhanaan nantinya walaupun dia memilliki jabatan paling tinggi di pemerintahan Indonesia. Kebahagian bukan didapat atas kemewahan harta yang melimpah ruah, kebahagiaan didapat dari keadaan dimana hati terpuaskan tanpa adanya tekanan, bebas, berani mengatasi kesulitan hidup, tidak menyerah pada keadaan, tidak mudah berputus asa, dan percaya dengan potensi yang ada pada diri sendiri.

Pada tahun 1934, Natsir mempersunting Puti Nur Nahar (lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal 28 Mei 1905 dan wafat di Jakarta pada 22 Juli 1991), yang pada mula bertemu dengan Natsir adalah salah seorang guru Taman Kanak-Kanak bersubsidi "Arjuna" Bandung dan aktifis JIB. Dari perkawinannya, ia dikarunia 6 orang anak, yakni Siti Mukhlisah (1936), Abu Hanifah (1937), Asma Faridah (1939), Hasnah Faizah (1941), Aisyatul Asriyah (1942), dan Ahmad Fauzi (1944).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Riwayat Pendidikan

Institusi pendidikan agama yang dilalui tidak ada kekhususan atau keistimewan dalam proses belajar dimasa kecilnya, sebab ayahnya seorang pegawai rendahan. Meskipun demikian Natsir mendapatkan kemudahan untuk dapat bersekolah di Sekolah Dasar Belanda, pendidikan keagamaannya dilalui dengan berguru pada alim ulama dikampungnya. Usia 18 tepat tahun 1926 Natsir berkeinginan untuk melanjutkan sekolah HIS Belanda, keinginannya tidak terwujud dikarenakan status pekerjaan ayahnya yang tidak Memiliki kedudukan khusus, akhirnya dia melanjutkannnya disekolah HIS Adabiyah di Padang.[2]

Natsir belajar di Padang tidak sampai dengan tamat dikarenakan ayahnya memindahkannya ke HIS Solok. Di sekolah inilah Natsir mulai belajar bahasa Arab dan Fiqih kepada tuanku Mudo Amin, seorang pengikut dan kawan Haji Rasul, Natsir menamatkan pendidikan HIS dan Madrasah Diniyah di Solok, dia juga mengikuti pelajaran secara teratur di Padang yang dibimbing oleh Haji Abdullah Ahmad di Padang.[3] Dari keterangan diatas dapat dilihat bagaimana Natsir telah mendapatkan dasar-dasar pemikiran pembaharuan Islam, minat inilah

---

[2] Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insan Press, 1999, 21
[3] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942,* Jakarta: LP3ES, 1996, 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang nantinya berkembang secara pesat dalam pemikirannya hingga berada di Bandung negeri perantauan pertamanya.

Setelah selesainya pendidikannya di Solok Natsir diajak kakaknya Rubiah ke Padang dan tahun 1923-1927 Natsir mendapat beasiswa untuk sekolah di *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO). Natsir aktif di kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler, tapi fokus utamanya kegiatan kurikuler MULO, dia masuk anggota Pandu Nationale Islamistizche Paviderij sejenis pramuka sekarang dan Jong Islamiten Bond (JIB) Padang yang diketuai oleh Sanusi Pane.[4]

Pada tahun 1927, M. Natsir meneruskan pendidikan formalnya ke AMS (Algemene Midlebane School) di Bandung. Di kota Bandung inilah Natsir menekuni ilmu pengetahuan barat, seperti mempelajari berbagai aspek sejarah peradaban Islam, Romawi, Yunani dan Eropa melalui buku-buku berbahasa Arab, Perancis dan Latin. Jadi, dalam usianya yang relatif muda (21 tahun) Natsir telah menguasai lima bahasa asing (Belanda, Arab, Inggris, Prencis dan Latin) dan dua bahasa daerah (Minangkabau dan Sunda). Penguasaan atas bahasa-bahasa tersebut sangat memungkinkan Natsir melakukan penjelajahan intelektual yang membentuknya menjadi menusia kosmopolitan.[5]

---

[4] Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, 22-23
[5] Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah menamatkan pendidikan di AMS tahun 1930, M. Natsir tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Melainkan mengajar di salah satu MULO di Bandung. Kenyataan ini merupakan panggilan jiwanya untuk mengajar agama yang pada masa itu pendidikan agama belum memadai.

Sadar pada sekolah umum yang tidak mengajarkan agama Natsir kemudian mendirikan lembaga Pendidikan Islam (Pendis). Suatu bentuk pendidikan modern yang mengkombinasikan kurikulum pendidikan umum dan pendidikan pesantren. Dalam hal ini Natsir menjabat sebagai Direktur Pendis selama 10 tahun sejak 1932. Lembaga tersebut kemudian berkembang di berbagai daerah Jawa Barat dan Jakarta.[6]

2. M. Natsir Dalam Dunia Politik

Natsir nama yang tidak asing bagi rakyat Indonesia, apalagi umat Islam khususnya kaitannya dengan perkembangan organisasi Islam di Indonesia. Organisasi Islam di Indonesia memiliki fase-fase dalam perkembangannya mulai dari Sarikat Dagang Islam yang dipimpin oleh Tjokro Aminoto sampai Partai Keadilan Sejahtera yang menyatakan sebagai organisasi Islam penyambung aspirasi umat. Zaman revolusi kemerdekaan bagian penting dari sejarah suatu bangsa, titik awal membangun cita-cita bersama dalam bernegara demi terciptanya tatanan

[6] Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang adil dan makmur. Ideologi negara merupakan sebagai landasan segenap rakyat Indonesia dalam melakukan sikap, perkataan, dalam menjalani kehidupan sosialnya. Dalam masa pergolakan penentuan ideologi bangsa Indonesia inilah Natsir cukup dikenal, karena ketokohannya maka perlu menampilkan kembali biografinya sebelum memahami secara mendalam tentang pemikirannya.

Kekentalan Islam dalam kehidupan sosial masyarakat di Minangkabau dan banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional, mengingatkan kita pada negeri kelahiran Natsir. Thohir Luth mengatakan bahwa Ranah Minang atau Minangkabau pada awal abad ke-20 dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang menjadi tempat kelahiran tokoh-tokoh Islam ternama. Mereka menjadi tokoh nasional diberbagai aspek seperti Syahrir dibidang politik, Hamka dibidang pendidikan, Hatta dibidang ekonomi, Tuanku Imam Bonjol, Agus Salim dan Natsir dibidang Agama, dan lain sebagainya.[7]

Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) berdiri pada tanggal 17 November 1945 melalui Kongres Nasional Umat Islam di Yogyakarata yang diketuai Sukiman, dulunya orang-orang didalamnya aktif di Majelis Islam A'la Indonesia. Natsir termasuk pelopor terbentuknya Masyumi, bahkan dia juga menjabat sebagai staf ketua sampai Masyumi dibubarkan

[7] Ibid, 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada masa pemerintahan Soekarno. Keterlibatan Natsir di partai Masyumi inilah yang mengantarkannya sebagai politisi sekaligus seoarang negarawan, setelah Natsir dipercaya menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sementara pada masa pemerintahan Sutan Sjahrir dia diangkat sebagai Menteri Penerangan.

Masyumi ini berbeda dengan Masyumi yang pernah dibentuk oleh Pemerintahan Jepang pada akhir tahun 1943, Masyumi bentukan Jepang ini hanya terbuka bagi perserikatan-perserikatan yang telah diberi status hukum oleh pemerintahan militer. Kiai dan ulama yang telah mendapat persetujuan dari pemeritahan bisa menjadi anggota, diperparah lagi mereka dibawah kontrol pemerintahan Jepang. Dengan demikian Masyumi bentukan Jepang tentu saja bertujuan untuk memuluskan kepentingan Jepang, sementara Masyumi yang dibentuk pasca kemerdekaan adalah organisasi politik yang berdiri tanpa campur tangan luar dan menadapat sambutan baik dari oraganisai Pergerakan Islam Nasional maupun sosial keagamaan.[8]

Dalam Masyumi terdiri dari beberapa oraganisai Islam antara lain: Muhammadiyah, Persis, Nahdhatul Ulama, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Natsir terlibat di Masyumi dari awal berdirinya dan tahun 1949 sampai tahun 1958 dia terpilih sebagai

---

[8] Ibid, 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang nomor satu di partai Masyumi. Komitmen Natsir yang kuat terhadap Islam dan berbagai kegiatan organisasi yang menjadikan Islam sebagai komitmen dalam perjuangan, hal inilah yang juga membuat Natsir berada di Masyumi.

Natsir selaku pimpinan Masyumi saat itu tentu mengalami perpecahan dengan mitranya yang merintis Masyumi dari awal berdirinya. Kelihaian Natsir diuji disaat itu sebagai seorang pemimipin untuk mengakomodir dan menyelesaian perbedaan yang bisa berakhir dengan perpecahan. Mosi integral yang diajukan Natsir dalam menyelamatkan Republik Indonesia dengan jalan konstitusi menjadikan debut politik amat cemerlang baginya. Dalam mengajukan gagasan mosi integral ini Natsir tentu melakukan perjuangan yang cukup menguras tenaga, lihat bagaimana dia harus melakukan pendekatan terhadap oragnisasi politik dan organisasi masyarakat. PKI sebagai organisasi barisan kiripun tidak luput untuk didekati, pertemuaan Natsir dengan Sakirman yang mewakili PKI misalnya tetap berjalan dengan baik.

Keberhasilan Natsir dalam mewacanakan mosi integral ternyata masih menyimpan cita-cita yang lebih besar yaitu bagaimana menjadikan Islam sebagai landasan atau dasar negara , perjuangan in dilakukannya bersama Masyumi. Dalam pidatonya yang berjudul "Islam Sebagai Dasar Negara" Natsir mengatakan bahwa untuk dasar negara, Indonesia hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai dua pilihan yaitu sekulerisme *(la diniyah)* atau paham keagamaan *(dini)*. Sedangkan Pancasila menurut pendapatnya adalah la diniyah sebab itu Pancasila sekuler karena tidak mengakui wahyu sebagai sumber, bisa dikatakan Pancasila adalah hasil penggalian dari masyarakat.

Sesuai dengan argumentasi yang dikemukakan oleh Natsir, mengajak masyarakat untuk melihat bahwa Islam sebagai agama anutan mayoritas masyarakat Indonesia. Tentu dengan posisi mayoritas anutan masyarakat menjadikan Islam memiliki akar yang kuat dalam masyarakat Indonesia, sebab itu menjadikan alasan yang kuat menjadikan Islam sebagai dasar negara. Argumentasi lain mengapa partai-partai Islam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, menurut Natsir karena ajaran Islam mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat juga menjamin keragaman hidup antara berbagai golongan dalam negara dengan penuh toleransi.[9]

3. Karya-Karya M. Natsir

Sebagai seorang intelektual ulama' M. Natsir melahirkan karya-karya ilmiah yang monumental. Karya-karya ilmiahnya menyangkut berbagai masalah sosial, poiltik, ekonomi, pendidikan dan dakwah. Prioritas utama dalam karya-karya ilmiah tersebut adalah menampilkan Islam sebagai trend

[9] Ibid, 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utamanya. Beberapa karya ilmiahnya yang merupakan hasil pemikirannya yaitu:

a. Capita Selecta yang berisi kumpulan pidatonya di beberapa forum dan karangan-karangannya yang dimuat di beberapa media massa. Dihimpun oleh D.P. Sati Alimin dan cetakan terakhir diterbitkan oleh Bulan Bintang. Buku ini berisi pemikiran M. Natsir di berbagai kehidupan sosial seperti kebudayaan, filsafat, pendidikan, agama dan politik kenegaraan.
b. Kebudayaan Islam Dalam Perspektif Sejarah, berisi kumpulan karangan yang dihimpun oleh Endang Saefuddin Anshari dan diterbitkan oleh Giri Mukti Pasaka.
c. Dunia Islam Dari Masa Ke Masa, berisi kumpulan M, Natsir tentang World Islam Festival dalam perspektif sejarah dan beberapa karangan lain. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Panji Masyarakat.
d. Fiqhud Dakwah, merupakan karya M. Natsir yang membahas konsep-konsep dakwah Islam. Karya ini terdiri atas bagan A dan B dengan jumlah halaman 287 (dua ratus delapan puluh tujuh).[10]
e. Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam, merupakan kumpulan tulisan M. Natsir mengenai hubungan agama dan negara dan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya. Kumpulan karangan sebagian pernah

[10] Thohir Luth, *M. Natsi, Dakwah Dan Pemikirannya,* Jakarta: Gema Insani, 1999, 63-64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disiarkan di media massa, kemudian disusun oleh Endang Saefuddin Anshari, MA dan Lembaga Islam untuk Penelitiandan Pengembangan Masyarakat (LIPPM)

B. Islam Dan Negara Menurut Pandangan M. Natsir

1. Islam Sebagai Pandangan Hidup

Sebagai agama terakhir, Islam diketahui memiliki karakter yang khas dibandingkan dengan agama-agama lain yang datang pada masa sebelumnya. Islam adalah agama yang diwahyukan Allah melalui rasulNya untuk menjadikan pandangan hidup bagi umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.[11]

Secara etimologi kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu kata salima yang berarti selamat, sentosa dan damai. Dari kata salima diubah menjadi aslama yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat. Sedangkan dalam pengertian syara' Islam diartikan dengan tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran yang dibawa nabi Muhammad SAW.[12]

Agama Islam bukanlah agama yang didasarkan karena pribadi yang membawanya dalam hal ini Muhammad SAW, melainkan kepada tuhan. Karena Muhammad adalah manusia biasa seperti manusia lainnya yang

---

[11] Dewan Redaksi Ensiklopedia, *Ensiklopedia Islam 2,* Jakarta; PT Ichtiar baru, Van Hooeve, 1994, 447

[12] *Ibid,* 447

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpilih sebagai nabi dan rasul dengan tugas menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Sedangkan tuhan adalah pusat dari segalanya dalam Islam. Walaupun demikian memahami riwayat kehidupan nabi Muhammad adalah suatu keharusan. Sebab salah satu sumber hukum Islam adalah sunnah rasul yang berupa sikap, perkataan dan perbuatan beliau disamping Al-qur'an dan ijma' ulama'. Selain itu kedudukan rasulullah di mata umat Islam sangat sentral karena Muhammad adalah penuntun dan contoh teladan yang harus diikuti.[13]

Sementara itu dalam pandangan M. Natsir agama dalam pengertian Islam adalah meliputi semua kaidah-kaidah dan muamalah dalam masyarakat menurut garis yang telah ditetapkan oleh Islam. Dengan demikian Islam bukanlah semata-mata sebagai agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan akan tetapi Islam mengandung dua unsur, yaitu pertama, hubungan manusia dengan tuhannya (hablun minallah), kedua, hubungan manusia dengan sesama (hablun min an-nas) unsur yang kedua inilah yang meliputi hidup orang-perorangan, kekeluargaan dan hidup kenegaraan.[14]

Untuk itu bagi M. Natsir manusia tidaklah lebih hanya sebagai hamba Allah yang harus mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Konskuensi dari penghambaan ini adalah keharusan bagi

---

[13] Abdul Aziz Thaba, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru,* Jakarta; Gema Insani Press, 1996, 40

[14] M. Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam,* Jakarta: Media Dakwah, 2001, 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia untuk selalu berusaha menerjemahkan semua perintah-perintah Allah yang telah diyakini kebenarannya dalam konteks kehidupannya baik individu maupun sosial, karena Islam pada hakekatnya adalah membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mencakup satu segi tetapi mencakup berbagai segi dari kehidupan manusia. Dan sumber-sumber ajaran itu adalah Al-qur'an dan hadis.[15]

Dengan demikian ajaran Islam bukan semata-mata hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia.

Dalam hal ini agama yang dijadikan oleh seseorang sebagai landasan (pandangan hidup) dalam menjalani kehidupannya akan membawa orang tersebut kepada hal yang menguntungkan baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.

2. Islam Sebagai Ideologi

M. Natsir meyakini terhadap kebenaran Islam sebagai ideologi kenegaraan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa Islam itu mencakup suatu pengertian yang sangat luas, seluas dimensi kehidupan manusia baik yang berkenaan dengan dunia maupun akhirat. Segala aspek yang terdapat dalam kehidupan dunia dan akhirat di atur oleh ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, Islam merupakan suatu ajaran yang lengkap termasuk dalam

---

[15] Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, jilid I, Jakarta UI Press, 1079, 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urusan kebangsaan dan kenegaraan. Kelengkapan ajaran Islam tertuang dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 208:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu"*[16]

Ayat di atas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman (Islam) supaya berperilaku secara Islami dalam segala hal. Dan ini pula yang kemudian menjadi dasar bagi M. Natsir dalam pemikirannya yang menyatakan bahwa Islam merupakan peraturan pergaulan hidup yang memberi hak sama rasa, memberi kewajiban sama berat atas segenap penduduk alam ini. Peraturan menyangkut budi pekerti, mengurus rumah tangga, mengurus pergaulan dalam negeri, pemerintahan dan kerajaan, perhubungan dengan mereka yang berlainan keyakinan, pertalian dengan mereka yang berlainan negeri, mendidik dan memimpin semangat pencapaian derajat kemanusiaan yang sepenuh-penuhnya.[17] Untuk itu bagi M. Natsir manusia tidak lebih hanya sebagai hamba Allah yang harus mematuhi segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.

---

[16] Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* 58
[17] Deliar Noer, *gerakan modern Islam di Indonesia 1900 – 1042,* Jakarta: LP3ES, 1982, 283

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hubungan dengan sesama manusia Allah memberikan garis-garis besarnya berupa kaidah-kaidah yang berkenaan dengan hak dan kewajiban seseorang terhadap masyarakat dan hak serta kewajiban masyarakat terhadap diri seseorang, hal ini dalam kehidupan dinamakan dengan urusan kenegaraan.

Seorang orientalis H.A.R. Gibb memperkuat pendapat Natsir bahwa Islam itu adalah lebih dari suatu sistem peribadatan. Islam adalah suatu kebudayaan atau peradaban yang lengkap dan sempurna. Adapaun tujuan Islam adalah agar agama hidup dalam kehidupan tiap-tiap orang hingga meresap ke dalam kehidupan masyarakat, ketatanegaraan, pemerintah dan perundang-undangan.[18]

Keyakinan M. Natsir terhadap kebenaran Islam sebagai ideologi kenegaraan telah dijadikan dasar untuk menolak segala pemikiran yang berbentuk sekulerisme (termasuk golongan yang ingin menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara). Karena menurut Natsir Islam adalah sebagai ideologi yang mampu membimbing manusia dalam hidupnya di dunia untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Selain itu, dalam kehidupan politik, manusia juga membutuhkan Islam sebagai ideologi Negara. Dengan

[18] A.M. Saefuddin, *Ijtihad Politik : Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 1996, 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, seorang muslim tidak mungkin melepaskan keterlibatannya dalam politik tanpa memberi perhatian kepada Islam.[19]

Berdasarkan pemikiran ideologinya itu, M. Natsir menolak segala bentuk pemikiran sekuler, karena pemikiran tersebut mengabaikan nilai-nilai transendental Islam sekaligus merupakan bahaya tersendiri bagi umat Islam.

Dalam salah satu pidatonya pada tanggal 12 November 1957 di Dewan Konstituante, Natsir menegaskan bahwa paham sekularisme adalah suatu pandangan hidup, opini-opini, tujuan-tujuan dan sifat-sifat yang hanya dibatasi oleh batas-batas keberadaan duniawi. Dalam kehidupan seorang sekularis tidak terdapat tujuan apapun yang berada dalam batas luar dunia seperti hari akhir, tuhan dan lain-lain. Walaupun ada kalanya mereka mengakui adanya tuhan, tetapi dalam sehari-hari misalnya seorang sekularis tidak pernah menganggap adanya hubngan jiwa dengan tuhan baik dalam setiap tingkah laku dan tindakan-tindakan sehari-hari maupun hubungan jiwa dalam arti do'a dan ibadah.[20]

Alasan lain penilakan Natsir terhadap sekulerisme adalah karena ketidak mampuan ideologi ini untuk menjawab persoalan arti hidup. Sehingga apabila menjadikannya sebagai sebuah ideologi, maka akan berakibat pada hilangnya makna hidup dan kemerosotan spiritual. Selain itu kaum sekularis menganggap konsep ketuhanan hanya sebagai hasil ciptaan

---

[19] Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, Jakarta: Teraju, 2002, 114
[20] Herbert Feith, *Pemikiran Politik Indonesia*, Jakarta; LP3ES, 1995, 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia belaka yang ditentukan oleh kondisi sosial. Bukan ditentukan oleh kebenaran wahyu sehingga bersifat relatif dan tergantung pada penemuan-penemuan manusia. Dengan demikian tolak ukur kebenaran dan kebahagiaan semata-mata hanya ditentukan oleh materi (benda). Hal ini dapat dilihat pada Negara-negara sekuler, dimana masalah ekonomi, politik, hukum, pendidikan dan sosial ditentukan oleh kepentingan material saja dan bukan nilai spiritual.

Dalam pidatonya yang berjudul *Islam sebagai dasar negara* Natsir mengatakan bahwa untuk dasar negara Indonesia hanya mempunyai dua pilihan, sekulerisme dan paham agama. Adapun Pancasila menurutnya adalah pencerminan dari sekulerisme. Karena ia tidak mengakui wahyu sebagai sumbernya. M. Natsir mengajak orang untuk melihat bahwa Islam sebagai agama anutan mayoritas rakyat Indonesia cukup mempunyai akar dalam masyarakat. Dengan demikian, ia mempunyai alasan yang kuat untuk dijadikan dasar negara karena Islam mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan masyarakat dan negara serta dapat menjamin keragaman hidup antar berbagai golongan dalam negara dengan penuh toleransi.[21]

Akan tetapi dalam pidatonya di Karachi pada tahun 1952 M. Natsir bisa menerima Pancasila karena ia memahami sila-sila dari Pancasila itu sesuai dengan Islam, malah ia juga mengemukakan bahwa Indonesia adalah

---

[21] Didin Saefuddin, *Pemikiran modern dan postmodern Islam,* Jakarta: PT. Gramedia Widia sarana Indonesia,2003, 209 - 210

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara Islam. Oleh sebab itu Islam sebagai dasar negara pun dikatakan oleh Natsir dalam bentuk yang ideal.[22]

Kelengkapan ideologi Islam inilah menurut M. Natsir sangat cocok bagi masyarakat Indonesia yang berpegang pada nilai agama. Karena itu, dia yakin akan kebenaran Islam sebagai sebuah ideologi. Hal ini mendorong M. Natsir untuk berkeyakinan terhadap eratnya hubungan agama (Islam) dan negara. Selain itu, hal mendasar inilah yang kemudian membuat Natsir begitu gigih memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Keyakinan itu pulalah yang membuat Natsir begitu peka terhadap nilai-nilai sekuler yang dianggapnya berlawanan dengan Islam.

3. Negara Adalah Alat

Masalah kenegaraan dalam khazanah pemikir intelektual muslim secara populer sering disebut fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah yang menghubungkan urusan ketatanegaraan dalam persepsi pemikir muslim dengan agama tidak terlepas dari asumsi bahwa suatu yang sangat mustahil. Apabila agama yang mengajarkan kepada umat manusia kebahagiaan di dunia dan akhirat. Serta mempunyai cita-cita memaslahatkan umat manusia, tidak mengajarkan aturan atau etika bernegara. Padahal, Negara merupakan

[22] Deliar Noer, *Islam dan Politik*, Jakarta; Yayasan Risalah, 2003, 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pranata yang secara jelas dapat merealisasikan kemaslahatan umat manusia tersebut.[23]

Dengan asumsi di atas, menurut M. Natsir negara adalah suatu *"institution"* yang punya hak, tugas, dan tujuan yang khusus. Institution dalam arti umum adalah suatu badan, organisasi yang mempunyai tujuan khusus dan dilengkapi alat-alat materialdan peraturan-peraturan tersendiri serta diakui oleh masyarakat umum.[24] Disinilah arti pentingnya lembaga negara sebagai alat untuk menerapkan hukum-hukum yang sudah ada. Tanpa adanya negara, maka akan sulit diharapkan adanya ketaatan pada hukum-hukum itu.

Mengenai negara sebagai institusi, M. Natsir mengikuti pendapat tentang persyaratan negara modern, negara harus memiliki wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan, konstitusi atau sumber hukum kekuasaan lain yang tidak tertulis. Bila membandingkan antara masyarakat dengan Negara, Natsir mengikuti pendapat Ibnu Khaldun yaitu kedua seperti hubungan antara benda dengan bentuknya, yang satu bergantung kepada yang lain. Oleh karena itu, menurut Natsir Negara harus mempunyai akar yang langsung tertanam dalam masyarakat. Dalam hal ini Islam merupakan agama mayoritas rakyat Indonesia yang sekaligus menunjukkan bahwa Islam

---

[23] Jeje Abdul Rozak, *Agama Dan Kekuasaan,* dalam Jurnal IAIN Sunan Ampel, Edisi XII, 1998
[24] Natsir, *Agama dan Negara,* 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai akar yang kuat dalam masyarakat Indonesia. karena itulah Islam mempunyai alasan yang kuat pula untuk dijadikan dasar Negara.[25]

Adapun pendekatan M. Natsir terhadap pelaksanaan syari'at Islam atau hukum-hukum Islam dalam masyarakat lebih menekankan pada pendekatan legal formal. Artinya, ia menganggap perlu adanya kekuasaan pemaksa yang sah dan diakui keberadaannya untuk diperlukan dalam batas-batas tertentu serta memaksa individu untuk taat dan patuh kepada hukum yang telah ditetapkan.[26]

Bagi Natsir karena Negara itu hanya merupakan alat untuk merealisasikan hukum-hukum Allah, maka hal ini dapat diartikan bahwa negara itu sifatnya bisa saja hanya sementara. Sebab apabila tujuan yang dikehendaki Islam telah tercapai maka dengan sendirinya ada kemungkinan negara tidak diperlukan lagi. Akan tetapi M. Natsir sendiri tidak memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai kelanjutan keberadaan negara apabila tujuan-tujuan Islam telah tercapai.

Sementara itu landasan utama untuk menjadikan negara sebagai alat adalah contoh sunnah rasul. Beliau sebagai nabi dan negarawan telah menunjukkan perlunya menegakkan Negara Islam. Buktinya adalah;

---

[25] Saefuddin, *Pemikiran Modern,* 215
[26] Suhelmi, *Polemik Negara Islam,* 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama, beliau sendiri menegakkan Negara Islam semasa hidupnya, kedua, teladan para sahabat nabi *(khulafa ar-rasyidin).*[27]

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa membentuk sebuah Negara sebagai alat untuk menjalankan hukum-hukum Allah itu tidak terbatas pada zaman rasul saja. Tetapi terus sepanjang zaman. Selama hukum-hukum Allah itu bersifat langgeng (abadi) dan akan tetap terjamin atau terjaga kebenarannya sampai akhir zaman.

Mengenai sifat dan watak asli hukum Allah *pertama,* bahwa hukum-hukum itu meliputi sejumlah hukum dan aturan yang dalam tingkatan tertentu membentuk suatu sistem sosial. Misalnya yang berkenaan dengan kehidupan keluarga dan sanak kerabat, toleransi beragama, perjanjian damai dan perang, tindak pidana dan perdata dan lain-lain.

Kedua, bahwa pelaksanaan hukum-hukum itu mempunyai tingkat ketergantungan yang besar dengan keberadaan Negara yang akan dijadikan alat untuk melaksankannya. Jadi, terdapat kemungkinan kecil umat Islam dapat menjalankan hukum-hukum Allah itu apabila tidak terlebih dahulu membangun suatu Negara.[28]

Sehubungan dengan negara sebagai alat inilah M. Natsir menganggap tidak perlu adanya ijma' ulama' tentang keharusan bersatunya agama dan

---

[27] *Ibid,* 124
[28] *Ibid,* 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara. Sebab ada atau tidak adanya ijma' ulama', keberadaan Negara di dunia memang suatu keharusan.

Dalam pandangan tentang negara M. Natsir mengatakan bahwa suatu Negara akan bersifat Islami bukan karena secara formal disebut "Negara Islam" ataupun "berdasarkan Islam", melainkan Negara itu disusun "sesuai ajaran agama Islam" baik dalam teori maupun praktiknya.[29]

M. Natsir menjelaskan bahwa negara bukan tujuan melainkan hanya alat untuk merealisasikan aturan-aturan Islam yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah. Semua aturan-aturan itu antara lain adalah kewajiban belajar, kewajiban zakat, pemberantasa perzinahan dan lain-lain. Semua itu tidak ada artinya jika tidak ada Negara. Karena itu Negara disini berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia (sebagai individu) maupun sebagai anggota masyarakat.[30]

Selain itu M. Natsir juga berpendapat bahwa Negara tidak perlu disuruh untuk didirikan dengan atau tanpa Islam, Negara bisa berdiri dan memang sudah berdiri sejak sebelum dan sesudah Islam. Dimana saja ada segolongan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, di zaman unta dan pohon kurma ada Negara, di zaman kapal terbang ada Negara. Negara di zaman untu berlaku sebagaimana yang munasabah dengan masa

---

[29] Saefuddin, *Pemikiran Modern,* 213
[30] Suhelmi, *Polemik Negara Islam,* 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, dan Negara di zaman kapal terbang berlaku sebagai mana yang munasabah di zaman kapal terbang. Tentang ada Negara yang teratur dan ada Negara yang kurang teratur adalah persoalan biasa. Tetapi bagaimanapun juga kedua-duanya adalah Negara, dengan atau tidak dengan Islam.[31]

Selanjutnya mengenai tatanan operasional, Negara dipimpin oleh seorang pimpinan kekuasaan (bisa disebut khalifah, amirul mu'minin, presiden atau yang lain) M. Natsir tidak mempersoalkan sebutan atau nama bagi pemimpin, yang terpenting adalah agamanya, sifat dan tabiatnya, akhlak dan kecakapannya untuk memegang kekuasaan yang diberikan kepadanya. Jadi, bukan bangsa dan keturunannya ataupun semata-mata inteleknya saja.[32] Terhadap penguasa Negara terpilih umat mempunyai kewajiban mengikuti selama ia benar dalam menjalankan kekuasaannya. Bila menyimpang, umat berhak melakukan koreksi atau mengingkari penguasa Negara. Dan masalah ini Islam menekankan kewajiban musyawarah tentang hak dan kewajiban antara penguasa dan yang dikuasai.

Prinsip musyawarah dalam Islam menurut M. Natsir tidak selalu identik dengan azas demokrasi. Hal ini terlihat saat M. Natsir menanggapi pernyataan bahwa demokrasi dijadikan alternatif bila timbul persoalan mengenai agama dan Negara. M. Natsir mengemukakan bahwa Islam

---

[31] Saefuddin, *Pemikiran Modern,* 214-215
[32] Suhelmi, *Polemik Negara Islam,* 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat demokratis dalam arti Islam itu anti istibdad, anti absolutisme dan Islam anti sewenag-wenang.[33]

Natsir mengakui demokrasi itu baik, tetapi ia tetap mengutamakan konsep Islam. Untuk itu ia tetap mendukung pemikiran tentang kedaulatan Tuhan. Menurutnya Islam mempunyai karakteristik tersendiri. Islam adalah suatu pengertian, suatu paham yang mempunyai sifat-sifat tersendiri pula. Islam tidak harus "demokrasi 100%" bukan pula "otokrasi 100%" Islam...ya Islam.[34]

Sementara itu dalam pandangan M. Natsir Islam berbeda dengan agama lain. Islam mengandung peraturan atau hukum tentang ketatanegaraan termasuk hukum perdata dan pidana. Dengan demikian Natsir menganggap bahwa untuk melaksanakan hukum tersebut diperlukan suatu lembaga atau disebut dengan Negara.

Sedangkan bentuk atau sistem pemerintahan, umat Islam bebas memilih asal tidak bertentangan dengan Islam. Natsir membenarkan bahwa Islam bersifat demokratis tetapi sama sekali tidak berarti dalam semua hal, termasuk hukum-hukum yang ditetapkan Islam, masih perlu dikukuhkan atau ditetapkan oleh DPR melalui pemungutan suara. Atau dengan kata lain, permusyawaratan itu hanya terbatas pada hal-hal yang belum ditetapkan hukumnya dan mencari cara yang terbaik untuk melaksanakan hukum yang

---

[33] Natsir, *Agama dan Negara*, 89
[34] *Ibid.* 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ditetapkan. Selain itu Natsir juga menerima sistem pemerintahan yang berdasarkan kerakyatan asalkan tetap menjunjung tinggi prinsip hukum Islam atau syari'ah.[35]

Dalam salah satu kesempatan M. Natsir pernah mengemukakan bahwa sejauh menyangkut umat Islam demokrasi adalah hal yang pertama, sebab Islam akan berhasil dalam suatu sistem demokrasi. Melalui sistem demokrasi inilah mereka mempunyai kesempatan membuat peraturan hukum yang sesuai dengan ajaran islam. Selain itu keyakinan Natsir ini pada dasarnya mencerminkan dirinya sebagai seorang yang demokrat. Karena ia bersikap kritis dan tidak senang terhadap tindakan politik diktatoral.[36]

Sementara itu pengertian demokrasi dalam Islam menurut Natsir adalah memberikan hak kepada rakyat supaya mengkritik, menegur, membetulkan pemerintahan yang dzalim. Kalau tidak cukup dengan kritikan dan teguran, Islam memberikan hak kepada rakyat untuk menghilangkan kedzaliman dengan kekuatan dan kekerasan jika diperlukan.[37]

Berawal dari pengertian tersebut pidato M. Natsir pada ulang tahun Masyumi yang ke XI menyatakan bahwa perlunya penekanan adanya demokrasi di Indonesia. dalam hal ini agar terjalin hubungan baik antara

---

[35] Djazali, *Islam dan Tata Negara,* Jakarta: UI Press, 1990, 193
[36] Suhelmi, *Polemik Negara Islam* ...125
[37] Natsir, *Agama dan Negara* ... 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasa dan rakyat, yaitu penguasa yang adil dengan penuh rasa cinta kepada rakyat dan memperhatikan keperluan rakyat lahir maupun bathin.

Bahkan lebih lanjut Natsir mengatakan bila kepercayaan dan cinta ini tidak ada hanya dihidup suburkan dalam sistem demokrasi dan bila hendak digantikan oleh diktator yang lemah, maka yang akan datang adalah bencana bagi Negara dalam arti yang sebenarnya.[38]

Tegasnya, bila demokrasi di Indonesia yang sumber kekuatannya berasal dari kerelaan, kecintaan rakyat pada pemerintah sampai dikubur dan tugasnya diganti dengan diktator yang kekuatannya bersumber kepada paksaan, maka timbul pertanyaan akan mampukah diktator yang tunggal itu mengumpulkan alat kekuasaan yang berupa bayonet dan senjata sebagai sumber kekuatan untuk memaksakan keinginan ke delapan puluh juta umat manusia yang bertebaran pada ribuan pulau dan mempunyai alat pemikiran sendiri-sendiri serta bermacam-macam tingkat kecerdasan, tradisi dan adat istiadat.[39]

Sedangkan M. Natsir menjamin bahwa dalam suatu Negara yang berlandaskan Islam umat dari agama-agama lain mendapat kemerdekaan beragama dengan luas. Mereka tidak akan keberatan kalau di Negara itu berlaku hukum Islam mengenai soal-soal kemasyarakatan. Karena hukum tersebut tidak bertentangan dengan agama mereka. Mengingat bahwa dalam

---

[38] Faith, *Pemikiran Politik Indonesia*, 76
[39] *Ibid*, 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama mereka memang tidak ada peraturan yang bersangkutan dengan hal-hal itu Dengan berlakunya undang-undang Islam, agama mereka tidak akan terganggu, tidak akan rusak dan tidak akan kurang suatu apapun.[40]

Namun pandangan Natsir tentang masalah demokrasi terbatas pada pandangan umum dan belum menyentuh pada kerangka pemikiran operasional. Hal ini dikarenakan Natsir tidak mempersoalkan sistem presidensil atau parlementer. Pemikiran Natsir baru pada tahapan konsepsional. Pemikiran konsepsional dalam masalah demokrasi tersebut meliputi semangat demokrasi yang terkandung dalam Islam. Dan yang dilakukan Natsir dengan demokrasinya adalah merupakan permulaan. Sebab bagi Natsir Islam dan demokrasi di Indonesia merupakan cita-cita dalam hidupnya.

4. Islam Dan Negara Dalam Pandangan M. Natsir

Mennurut pandangan M. Natsir agama Islam berbeda dengan agama-agama lain. Islam mempunyai beberapa aturan yang berkenaan dengan hukum-hukum kenegaraan dan pidana, serta beberapa peraturan yang berhubungan dengan mu'amalah. Yang kesemaunya itu adalah bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama Islam itu sendiri.[41]

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh M. Natsir bahwa Negara bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebagai alat urusan kenegaraan dan pada

---

[40] Munawir Djazali, *Islam dan Tata Negara*, 193
[41] M. Natsir, *Agama dan Negara*, 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya adalah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Islam. Yang menjadi tujuan ialah kesempurnan berlakunya undang-undang ilahi baik yang berkenaan dengan prikehidupan manusia sendiri (sebagai makhluk individu) atau pun sebagai anggota masyarakat. Baik yang berkenaan dengan kehidupan dunia yang fana ini ataupun yang berhubungan dengan kehidupan akhirat.[42]

Dalam konteks relasi Islam dan negara, landasan dari pandangan M. Natsir adalah Al-Qur'an surat adz-Dzariyat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya *:"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku".*[43]

Berdasarkan ayat inilah kemudian Natsir mengembangkan teorinya dengan mengatakan "seorang Islam hidup di dunia ini dengan cita-cita kehidupan supaya menjadi seorang hamba Allah dalam arti yang sepenuhnya, yakni hamba Allah yang mencapai kejayaan dunia dan kemenangan akhirat. Dunia dan akhirat ini sama sekali bagi muslimin tidak bisa dipisahkan dari ideologi mereka"[44] selanjutnya M. Natsir berpendapat bahwa negara sebagai kekuatan dunia merupakan sesuatu yang mutlak sebab hanya dengan itulah

---

[42] *Ibid,* 83
[43] Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* Jakarta: PT. Sari Agung, 2002, 51
[44] M. Natsir, *Agama dan Negara,* 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan-aturan dan ajaran-ajaran Al-Qur'an dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata.[45]

Modernisasi politik Islam yang diistilahkan oleh Natsir mempunyai arti sebagai sikap dan pandangan yang berusaha untuk menerapkan nilai dari ajaran kerohanian, sosial dan politik Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman dalam sejarah peradaban umat manusia. Dalam term politik seperti inilah Natsir kemudian mewajibkan kepada setiap umat manusia untuk berpolitik sebagai sarana berdakwah Islam, oleh karen itu menurutnya, sebagai seorang muslim kita tidak bisa melepaskan diri dari Islam. Karena bagi muslim menegakkan islam itu tidak dapat dilepaskan dari menegakkan masyarakat, menegakkan negara dan menegakkan kemerdekaan.[46]

---

[45] Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern,* 216
[46] *Ibid,* 214

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
ISLAM DAN NEGARA DALAM PANDANGAN PARTAI BULAN BINTANG

A. Latar Belakang Berdirinya Partai Bulan Bintang

Sejarah perjalanan Partai Bulan Bintang (PBB) tidak terlepas dari perjalanan sebuah partai yang pernah punya nama besar dan sangat mendominasi warna perpolitikan Indonesia, Adalah partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) yang didirikan pada bulan Oktober 1943. Selain itu juga tidak terlepas dari setting sosial politik pasca reformasi 1998 simbol dari terbuka luasnya kran demokrasi yang memberi kebebasan penuh kepada seluruh elemen untuk berbuat lebih banyak dalam dunia politik, baik melalui partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan.

Setelah Masyumi dipaksa bubar, umat Islam seperti kehilangan pegangan. Umat Islam terlunta-lunta sepanjang kekuasaan Orde Lama. Tokoh-tokoh Islam dijebloskan ke penjara tanpa kesalahan yang jelas. Singkatnya, umat Islam menjadi bulan-bulanan pemerintah Orde lama dibawah pimpinan Soekarno.

Namun begitu cita-cita politik Masyumi tampaknya tidak sepenuhnya padam karena itu pada awal Orde Baru tepatnya pada tahun 1967 M. Natsir, Anwar Harjono dan teman-teman yang termasuk eks Masyumi membentuk Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Sebuah organisasi besar di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia karena ia mengerti benar bahwa untuk melakukan perubahan tidak mesti lewat parlemen. Merubah sikap muslim dapat dilakukan melalui kegiatan dakwah secara intensif.

Kemudian selepas Soeharto, Indonesia memasuki fase baru "liberalisasi politik". Yang paling mencolok dari fase ini adalah tuntutan berbagai kalangan termasuk kalangan umat Islam agar hak-hak politik dipulihkan dan dikembalikan. Inilah yang kemudian kita dengan dengan fase ledakan aspirasi poiltik yang sangat seragam bentuknya.

Salah satu diantara sekian bentuk ledakan partisipasi itu adalah pendirian partai politik dalam perubahan poltik yang sangat beruntun itu. Komunitas Islam politik merasa berkepentingan untuk mendirikan partai baru.hasrat ini merupakan keinginan tersembunyi selama 32 tahun aspirasi politik selalu ditekan. Lihatlah keinginan merehabilitasi partai Masyumi pada awal Ode Baru yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tetapi tidak memuaskan mereka. Keinginan mereka tetap satu yakni ingin mendirikan partai politik berazaskan Islam sebagai mana Masyumi dahulu. Dan kesempatan ini datang setelah Soeharto jatuh.[1]

Ada beberapa faktor yang menjadi cita-cita generasi penerus partai Masyumi untuk meneruskan perjuangan Masyumi tanpa ada tekanan dan

---

[1] Kholid Navianto, *Era Baru Indonesia: Sosialisasi Pemikiran Amin Rais, Hamzah haz, Nurmahmudi, Mathori Abdul Jalil dan Yuzril ihza Mahendra* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paksaan dari pemerintah. Pertama, keprihatinan para tokoh eks Masyumi terhadap proses kristenisasi di Indonesia pada era Orde Baru.

Kedua, kondisi birokrasi politik, dalam arti lain campur tangan pemerintah dalam kehidupan politik terlalu besar dan melampaui batas. Tampak pada awal Orde Baru berdiri pemerintah menolak para pemimpin Masyumi yang ingin memimpin kembali pada Partai Islam Indonesia (parmusi).

Ketiga, diferensiasi yang menyebabkan kesadaran baru bagi umat. Perhatian umat terbagi-bagi bukan hanya dalam bidang politik saja yang sebelumnya dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Tapi juga terhadapa bidang-bidang lain. Proses modernisasi dan pembangunan juga mempengaruhi perkembangan dan pergeseran pemikiran ideologis seperti cita-cita neagara Islam yang ideal kepada gagasan yang sitematik dan rasional.

Keempat, konsep politik Islam yang kurang jelas dan kurang lengkap. Orientasi politik Islam adalah ditegakkannya sistem pemerintahan khilafah dan imamah. Tetapi kondisi bangsa Indonesia yang majemuk sangat sulit untuk mewujudkan hal ini. Ada hal-hal yang belum dicakup dalam pemikiran politik Islam. Seperti distribusi kekuasaan, sebagaimana yang dikenal konsep politik modern, sistem pengalihan kekuasaan dan cara pembentukan pemerintahan. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini juga menjadi sebab umat islam menerima Pancasila sebagai dasar negara ketika Indonesia baru terlahir pada tahun 1945.[2]

Maka setelah runtuhnya kekuasaan Orde Baru Indonesia mengalami reformasi dimana partai politik khususnya partai politik Islam serasa bangkit kembali dan kebebasan ruang untuk mendirikan partai politik Islam dengan mengusung ideologi yang dianutnyta dengan bebas dan tanpa tekanan. Salah satu partai politik Islam yang mengikuti eforia tersebut adalah Partai Bulan Bintang.

Berdirinya partai Bulan Bintang diawali oleh kehendak beberapa tokoh Islam untuk mendirikan sebuah institusi yang secara formal bisa mengadvokasi (memperjuangkan) kepentingan-kepentingan politik umat Islam. Sebagai langkah awal didirikan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang dipelopori oleh almarhum DR. Muhammad Natsir dan almarhum KH. Masykur.[3]

FUI beranggotakan para eksponen dan tokoh umat Islam secara perorangan dari banyak organisasi masyarakat yang aktivitasnya antara lain melakukan diskusi-diskusi dalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI). Salah satu keinginan kuat FUI adalah kehendak menghimpun potensi Indonesia dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara kesaruan republik Indonesia sesuai

---

[2] Sudirman teba, *Islam Orde Baru,* Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1993, 300

[3] Abd Rokhim Ghazali, *Yuzril Ihza Mahendra Sosok Politisi Muda Muslim,* Jakarta: Raja Grafindo, 1999, 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.[4]

Melalui FUI itulah para tokoh Islam berdiskusi, berembuk dan bertuklar fikiran bagaimana caranya untuk mewujudkan keinginan umat diatas. Yang pada akhirnya di ambil kata sepakat untuk mendeklarasikan satu partai Islam sebagai satu wahana bagi artikulasi kepentingan politik umat Islam. Partai inilah yang kemudian disepakati bernama Partai Bulan Bintang (PBB).

Embrio dari partai yang secara aspiratif mencerminkan keislaman, kebangsaan dan kegenerasian serta berwawasan demokrasi ini adalah BKUI yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) organisasi kemasyarakatan dan dakwah Islam. Meski demikian Partai Bulan Bintang tidak didirikan oleh organisasi-organisasi tersebut, melainkan partai ini didirikan oleh tokoh-tokohnya secara perorangan.

Tepat pada tanggal 17 Juli 1998 tercapai kesepakatan (rabiul Awal 1919 H) tercapai kesepakatan oleh semua anggota BKUI akan mendirikan partai Islam dengan nama Partai Bulan Bintang (PBB). Kemudian pada hari Minggu 26 Juli 1998 di halaman mesjid Agung Al-Azhar, PBB secara resmi diumumkan. Teks deklarasi dibacakan oleh DR. Anwar Harjono SH selaku sesepuh PBB. Dalam kesempatan itu Anwar hrjono mengatakan bahwa partai ini secara

---

[4] *Ibid,* 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspiratif mencerminkan visi keIslaman, kebangsaan dan kegenerasian. Partai ini juga berwawasan politik yang demokratis.[5]

Dalam deklarasi juga dinyatakan bahwa PBB didirikan dengan dilandasi niat membangun bangsa dan negara bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan suku, asal usul keturunan, agama maupun golongan. Serta prinsip bahwa islam adalah rahmat bagi seluruh alam.

B. Khittah Perjuangan Partai Bulan Bintang

Khittah Perjuangan Partai adalah garis-garis besar perjuangan partai yang merupakan refleksi operasional kandungan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Tafsir Asas serta mengakomodasi aspirasi dan upaya aktualisasi kepentingan partai yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia dalam bentuk-bentuk program-program umum perjuangan politik partai yang akan dilaksanakan kedepannya.[6]

Namun yang dibahas pada bagian ini hanya mengenai Asas, Visi dan Misi, serta platform partai Bulan Bintang.

1. Asas dan Tujuan

Dalam wahyu terakhir yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW pada waktu pelaksanaan haji wada' (perpisahan), Allah menyatakan dengan

---

[5]Musa Kazhim dan Alfia Hamzah, *5 Partai Dalam Timbangan: Analisis dan Prospek,* Bandung: Pustaka Hidayah, 1999, 106

[6] Khittah Perjuangan PBB, Jakarta: DPP PBB, 2005, 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tegas tentang kesempurnaan Islam. Dan Allah meridhai Islam sebagai pedoman dan jalan hidup bagi manusia.[7] Yaitu surat al-Maidah ayat 3:

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

Artinya : *"Pada hari ini Aku sempurnakan untukmu agama kamu, dan Aku telah ciptakan nikmatKu, dan Aku telah ridhai Islam sebagai agama bagi kamu"*[8]

Dalam satu bagian dari khutbah wadha', Rasulullah SAW menyampaikan wasiatnya, manusia tidak akan pernah tersesat dan akan selamat dalam hidup selama-lamanya di dunia maupun di akhirat jika perpegang teguh pada dua hal yang diwariskannya, yaitu al-Qur'an dan Hadiṣ yang merupakan kodifikasi seluruh ajaran Islam yang utuh dan lengkap.

Berdasarkan dalil dari al-Qur'an diatas, sejarah perjuangan umat Islam, sejumlah pimpinan umat Islam mendirikan Partai Bulan Bintang dengan Islam sebagai Asasnya. Persepsi, pemahaman dan implementasi Islam sebagai asas partai yang menjiwai Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Pedoman Organisasi, dan Kittah perjuangan partai.

Asas adalah hukum dasar yang berkenaan dengan dasar cita-cita perkumpulan atau organisasi, yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau berpendapat.[9]

---

[7] Tafsir Azas PBB, Jakarta: DPP PBB, 2005, 70

[8] Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 193

[9] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Balai Pustaka, 1990, 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas Islam bagi Partai Bulan Bintang (PBB) berarti bahwa partai meyakini dengan sungguh-sungguh kebenaran Islam sebagai agama Allah SWT yang diturunkan untuk mengeluarkan umat dari suasana gelap gulita (kekafiran) munuju suasana terang benderang (keimanan).

Setiap ucapan, pemikiran dan tindakan warga partai senantiasa berlandaskan kepada ajaran Islam yang merupakan sumber inspirasi, motivasi, hukum dan pandangan hidup.

Asas Islam juga berarti bahwa Partai Bulan Bintang dalam segala kegiatannya berpedoman kepada petunjuk Islam yang *kaafah.* Maka ajaran Islam adalah ajaran agama yang baik, lurus dan kaafah. Islam adalah agama yang esensinya telah diturunkan Allah SWT kepada para nabi sejak nabi Adam. Kemudian Islam diturunkan kepada nabi dan rasul penutup yaitu Muhammad SAW sebagai satu-satunya agama yang telah disempurnakan untuk ditegakkan dalam keutuhan hidup dan kehidupan manusia.[10]

Sebagaimana firman Allah surat al-Syura ayat 13:

۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ

إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ ۚ ﴿١٣﴾

Artinya : *"Dia (Allah) telah mensyari'atkan bagimu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan apa yang telah Kami wahyukan*

[10] Tafsir Azas PBB, Jakarta: DPP PBB, 2005, 75-76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadamu (Muhammad), dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya'[11]

Selain Islam adalah azas, juga menjadi aqidah Partai Bulan Bintang. Berazas dan beraqidah Islam menurut penafsiran PBB berarti bahwa warga partai meyakini dengan sungguh-sungguh kebenaran Islam sebagai hamba Allah yang diturunkan untk mengeluarkan umat manusia dari suasana gelap gulita menuju suasana terang benderang. Setiap ucapan, pemikiran dan tindakan warga partai senantiasa berlandaskan kepada ajaran Islam universal yang melampaui ruang dan waktu. Bagi warga Bulan Bintang ajaran Islam merupakan sumber inspirasi, motivasi dan hukum dalam kehidupan duniawi. Ajaran Islam yang bersifat universal itu meliputi pokok-pokok aqidah, syari'at dan akhlak serta berbagai bidang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusiabaik di dunia maupun di akhirat.[12]

Sedangkan selain asas yang telah dijelaskan di atas, Partai Bulan Bintang mempunyai tujuan yaitu, sebagai tujuan umum adalah terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 dan berkembangnya kehidupan demokrasi dengan menghormati kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Rakyat Indonesia berdasarkan

---

[11] Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* 962
[12] Zainal Abidin Amir, *Peta Politik Islam Pasca Soeharto,* Jakarta: LP3ES, 2003, 67-68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip-prinsip ajaran Islam. Kemudian tujuan khusus didirikannya partai ini adalah terwujudnya tegaknya syari'at Islam.[13]

2. Visi dan Misi

Visi Partai Bulan Bintang adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Sedangkan Misi Partai Bulan Bintang adalah membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.[14]

Sebagai bentuk manifestasi dari visi dan misi Partai Bulan Bintang (PBB) ada beberapa piagam partai baik secara internal maupun secara eksternal yang tersusun dalam strategi perjuangan partai tidak terkecuali pemahaman tentang syari'at Islam dan pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia. Adapun strategi perjuangannya yaitu:

a. Meningkatkan konsolidasi dan pemberdayaan partai terutama membangun jaringan partai sampai tingkat paling bawah Ranting, RW, RT dan melakukan proses kaderisasi secara komprehensif.
b. Melakukan pembinaan dan pengembangan spirit Ukhuwah Islamiyah dengan menghormati pluraitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Menentukan pilihan sikap dan tindakan politik yang tepat dan Islami.

---

[13] AD/ART PBB, Jakarta: DPP PBB, 2005, 26
[14] Tafsir Azas PBB, Jakarta: DPP PBB, 2005, 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Membangun citra partai sebagai partai Islam yang dicintai dan dekat dengan umat serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
e. Melaksanakan aktivitas yang menyentuh kepada kepentingan umat.
f. Melaksanakan persiapan-persiapan dini untuk Pemilihan Umum.
g. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan generasi muda dan perempuan.[15]

Selain itu untuk mencapai visi dan misinya sebagai partai Islam PBB menuangkan dalan tafsir azas yang meliputi berbagai term, mulai dari landasan pemikiran secara filosofis, normatif dan historis menuangkan dalam bentuk konsep aqidah, syari'ah dan akhlak.

Aqidah Islam bagi PBB bermakna bahwa setiap anggota partai yang sungguh-sungguh meyakini ke-Esa-an Allah sebagai tuhan satu-satunya yang patut dan wajib disembah, diagungkan, ditaati dan diperhatikan perintah dan larangannya. Karena hanya Allah yang mempunyai kebesaaran dan kebenaran. Tidak ada pengkultusan kepada selain Allah, dan perubahan harus mengikuti jalannya, yang berarti dalam keluhuran, kebenaran, keadilan dan kebahagiaan seluruh umat manusia.

Karena itu sesuai dengan fitrahnya, manusia adalah makhluk yang mempunyai tugas pokok yaitu semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah. Jadi, siapaun yang bergabung dalam PBB wajib mempunyai niat dan motivasi yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah SWT dan diniatkan

[15] Khittah Perjuangan PBB, Jakarta: DPP PBB, 2005, 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beribadah melalui partisipasi (ta'awun) dalam partai dengan bekerja keras untuk menegakkan Islam (jihad fisabilillah). Serta patuh dan tunduk kepada perintah-Nya dan meninggalkan semua larangan-Nya.[16]

3. Platform Partai

Islam di Indonesia telah berabad-abad lamanya, telah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Sebab itu kalau berbicara Islam, juga berbicara tentang bangsa Indonesia. Sebaliknya kalau berbicara bangsa belum tentu akan bicara Islam. Karena mengenal ada dua jenis paham nasionalisme: pertama, adalah paham kebangsaan yang dijiwai oleh ajaran Islam yang disebut nasionalisme Islami atau golongan kebangsaan Islam. kedua, adalah golongan kebangsaan sekuler yang tidak menggali paham ajaran-ajaran agama bahkan dalam praktiknya cenderung memusuhi ajaran agama.[17]

Kalau diabad yang lalu para pejuang Islam telah mengibarkan bendera Islam dalam melawan penjajahan mereka sebenarnya tidak berjuang untuk Negara lain. Mereka berjuang untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Di awal abad ke-20 ketika didirikan sarekat Islam mereka menggunakan simbol dan nama Islam. Namun pada sejarahnya, Sarekat Islam adalah organisasi yang pertama kali mendidik dan memperkenalkan kita pada paham kebangsaan.

---

[16] Tafsir Azas PBB, Jakarta: DPP PBB, 2005, 78-79
[17] Musa Kazhim dan Alfia Hamzah, *5 Partai Dalam Timbangan,* 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah partai politik bukan gerakan ideologi, bukan gerakan dakwah dalam arti yang biasa, walaupun sebenarnya politik adalah bagian integral dari dakwah itu sendiri. Partai politik mempunyai agenda politik yang jelas dalam susunan organisasinya, struktur, program-programnya dikampanyekan, diprogramkan ikut pemilihan umum. Maka partai itu akan memerintah negeri ini. Itulah maksud didirikannya Partai Bulan Bintang.[18]

Oleh karena itu Partai Partai Bulan Bintang (PBB) mempunyai wilayah dan jangkauan kerja yang jelas yaitu bekerja di Indonesia dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negara Indonesia.

Ke-Islam-an sebagai platform partai Bulan Bintang, maksudnya yaitu bahwa Umat Islam yakin sedalam-dalamnya bahwa ajaran Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. PBB meyakini apa yang telah dipesankan oleh Rasulullah SAW pada waktu beliau menyampaikan haji wadha'. "aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua pusaka itu adalah Alqur'an dan As-sunah". Bagi PBB Alqur'an adalah petunjuk universal bagi umat manusia. Penjelasan dan pembeda antara kebenaran dan kesalahan. Di dalam al-Qur'an dan Sunnah itu terdapat petunjuk-petunjuk yang universal tentang persoalan-persoalan yang dihadapi manusia.

---

[18] *Ibid*, 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di bidang peribatan semua itu telah jelas dalam Alqur'an dan telah dirinci dalam Sunnah Rasulullah SAW. Hanya soal-soal kecil saja yang memerlukan pemikiran dan ijtihad dikalangan ulama-ulama Islam. Sebaliknya ajaran-ajaran yang mengurusi kemasyarakatan yang diberikan Alqur'an adalah pokok-pokoknya, prinsip-prinsipnya saja. Bahkan di bidang hukum, Alqur'an yang merupakan syari'ah, hanya dua bidang saja muamalat yang diatur Al-qur'an secara rinci, yaitu bidang hukum perkawinan dan hukum waris. Selain dua bidang ini, juga dalam hal menyusun bidang hukum ekonomi, hukum perbankan, hukum fiskal, UU Negara, Undang-Undang lalu lintas, hukum pidana dan lain-lainnya, terbuka seluas-luasnya untuk berijtihad

Selain itu yang dimaksud ke-Islam-an adalah PBB memegang teguh akidah Islamiyah dan akan berpolitik berdasarkan prinsip-prinsip akhlak Islamiyah. Bagi PBB politik bukanlah sesuatu yang kotor. Politik bukanlah menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Tetapi harus berdasarkan pada akhlak yang baik. Karena itu kalau partai Bulan Bintang didirikan kemudian ada berbagai macam fitnah, isu, rumor yang dilontarkan orang terhadap partai ini. Mendengar dan menghadapi isu, rumor dan caci maki ini dengan sabar dan tawakkal, tidak membalas segalanya itu, karena PBB berpegang pada ajaran "tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik".[19]

---

[19] *Ibid,* 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partai Bulan Bintang memperjuangkan sistem yang kuat di negara ini. Ada sistem kelembagaan yang jelas, DPR dan lain-lain kewenangannya jelas, kemudian ada prosedur dan hukum serta proses rekruitmen yang jelas untuk mengisi jabatan-jabatan itu. Partai ini akan memperjuangkan sebuah system yang kuat bukan memperjuangkan seorang kader untuk menjadi pemimpin atau presiden. Karena kalau sistemnya kuat siapapun bisa jadi presiden, asal ada otak dan orangnya baik. Tidak perlu orangnya disembah-sembah, dipuja-puja. Ini masalah besar bagi kita sekarang karena timbul lagi pengkultusan-pengkultusan kepada seseorang, ini mendekati kemusyrikan.[20]

Partai Bulan Bintang menolak habis-habisan dua hal yaitu militerisme dan komunisme. PBB mengikuti garis Masyumi. Partai Masyumi dulu terang garisnya, mereka bisa bekerja sama dengan siapa saja, satu-satunya yang tidak bisa adalah kerja sama dengan PKI. Ada tanda-tanda komunisme akan bangkit lagi ditengah-tengah masyarakat kita ini. Kita tak bisa bilang tidak, apalagi banyak orang kelaparan dan itu adalah ladang subur bagi tumbuhnya komunisme.[21]

C. Islam Dan Negara Menurut Partai Bulan Bintang

1. Islam Sebagai Pedoman Hidup

Islam adalah agama fitrah, karena ajaran-ajarannya merupakan sebuah sistem pedoman dan tuntunan hidup yang komprehensif dan munasabah

[20] *Ibid,* 118
[21] *Ibid,* 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(relevan) dengan keutuhan seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Manusia dituntut menghadapkan dirinya untuk menegakkan Islam seutuhnya.

Pedoman dan tuntunan yang lazim ini disebut syari'at Islam yang diteladankan oleh Rasul yang memandu manusia dalam melaksanakan ibadah secara utuh, ibadah mahdah (khusus) dan ghairu mahdah (umum/muamalah) sebagaimana Allah menyerukan kepada umatNya yang beriman supaya menerima dan melaksanakan ajaran Islam, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 208:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨

Artinya : *"hai orang-orang yang* beriman, *masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu"*[22]

Menerima dan menegakkan Islam juga bermakna membentengi diri terhadap tipu daya setan yang selalu mendorong supaya menerima dan melaksanakan ajaran Islam sebagian saja dan meninggalkan sebagian yang lain. Agar kehinaan dan kesengsaraan akhirat yang akan dialami setan dirasakan pula oleh manusia. Pelaksanaan syari'at Islam yang utuh dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara memerlukan peran dan posisi

[22] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya,* Semarang:PT Karya Toha Putra, 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik yang kuat. Oleh karena itu perjuangan politik Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan kewajiban syar'i dan upaya melaksanakan kewajiban mengikuti sunnah (tuntunan) nabi Muhammad SAW.[23]

Menurut PBB, syari'at Islam merupakan sumber hukum tertinggi yang prinsip-prinsipnya dapat ditransformasikan menjadi hukum nasional dengan memperhatikan keperluan ruang dan waktu untuk melindungi semua warga Negara. PBB dalam hal ini melihat kemajemukan dan kesatuan hukum dari sudut pandang "Bhinneka Tunggal Ika". PBB berjuang untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang adil dan menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas dimana semua orang punya kedudukan yang sama didepan hukum.[24]

Mengenai negara Indonesia yang plural, PBB berkeyakinan bahwa Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin.* PBB bisa berdamai dengan siapapun termasuk mereka yang non-muslim. Rasulullah pernah menerapkannya ketika di Madinah, pada masa itu rasul bias berdamai dengan mereka yang non-muslim untuk membangun dan melindungi Madinah dari serangan musuh kafir Quraisy yang kemudian dikenal dengan konsep "Piagam Madinah".

Partai Bulan Bintang berpedoman seutuhnya pada ajaran Islam, sebuah sistem panduan hidup yang pokok-pokok ajarannya meliputi akidah, syari'ah

---

[23] Tafsir Asa PBB, Jakarta: DPP PBB, 2005, 79-80
[24] *Ibid*, 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan akhlak. Karena itu seluruh aspek perjuangan dengan sikap, ucap dan perilaku segenap fungsionaris dan kader partai harus berlandaskan dan berpedoman pada Islam yang prinsip-prinsip ajarannya cukup jelas baik dari al-Qur'an dan Hadiṣ.

Islam diturunkan melalui rasul pilihan-Nya yaitu nabi Muhammad SAW untuk ditegakkan sebagai pedoman hidup dan kehidupan manusia. Karena itu sepanjang eksistensinya hidup manusia merupakan perjuangan menegakkan Islam di manapun dan kapanpun. Manusia yang mencari-cari pedoman hidup selain Islam, hidupnya bukan hanya jauh dari keselamatan dan keridhaan Allah, di akhiratpun akan tergolong orang-orang yang rugi.[25]

Sebagaimana Allah tegaskan dalam al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 85:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

Artinya : *"Siapa saja yang mencari agama atau pedoman hidup selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima (agama itu) dari padanya, dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang rugi'*[26]

Bagaimanapun situasi dan kondisi pada masa dan zaman apapun, pilihan berada ditangan manusia sendiri antara menerima agama itu dengan sepenuh hati, atau menerima sebagiannya dan menolak sebagian yang lain, atau menolaknya secara keseluruhannya. Pilihan menerima atau menolak ajaran Islam ini dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia

[25] Dewan Pimpinan Pusat, *Hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang,* Jakarta: DPP PBB, Periode 2005-2010, 71

[26]Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuktikan bahwa masuknya Islam secara damai, antara lain melalui perdagangan, dakwah dan asimilasi perkawinan antara muslim dengan penduduk setempat (pribumi).[27]

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Islam juga mensyari'atkan kepada manusia dalam rangka menjalankan tugas ke-khalifah-an (kepemimpinan) tentunya secara fitrah harus harus diawali dari diri sendiri dalam ketaatan menjalankan syari'at sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT (hubungan kepada Allah) dan sosial kemasyarakatan (hubungan dengan sesama).

Pada dasarnya ketaatan pada diri sendiri (pribadi) dan keluarga dalam syari'at Allah merupakan pondasi bagi pelaksanaan tugas ke-khalifah-an (kepemimpinan). Mengingat pribadi merupakan individu dalam masyarakat, dan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Karena itu baik buruknya kehidupan masyarakat dan bangsa terletak pada baik buruknya pribadi dan keluarga yang hidup dalam masyarakat suatu bangsa tersebut.

Masyarakat adalah kumpulan manusia secara kolektif menempati suatu kawasan tertentu, hidup dan bergaul satu sama lain dalam menyelenggarakan kepentingan bersama. Manusia adalah makhluk

---

[27] *Ibid*, 71-72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, karena secara alamiah manusia tidak mungkin hidup menyendiri.[28]

Bangsa adalah kumpulan masyarakat yang mendiami suatu kawasan tertentu, baik berdasarkan ikatan kesamaan keturunan ataupun terbentuk karena kesamaan tertentu, ataupun terbentuk karena kesamaan nasib dan kehendak.[29]

2. Negara Adalah Alat Untuk Mencapai Tujuan

Negara adalah organisasi kekuasaan untuk mengelola kepentingan bersama dalam rangka *amar ma'ruf* dan *nahi munkār* untuk menciptakan tatanan masyarakat yang dikehendaki oleh Allah SWT. Negara memiliki kekuasaan dalam merumuskan kebijkan, melakukan tindakan, bahkan memaksakan sesuatu berdasarkan kuasa yang diberikan oleh norma-norma hukum yang berlaku dan dilandasi oleh prinsip, keadilan, kejujuran dan kebenaran. Bagi warga Bulan Bintang, Negara adalah wadah dan sekaligus alat untuk mencapai tujuan menegakkan syari'at Islam dan Negara bukanlah tujuan itu sendiri.[30]

Sebagai alat, keberadaan negara adalah sebagai institusi yang perlu diciptakan, karena tanpa adanya Negara mustahil orang akan dapat merealisasikan tujuan bersama. Negara adalah alat yang bersifat keduniaan,

---

[28] Tafsir Azas PBB, (Jakarta: DPP PBB, 2005), 101
[29] *Ibid,* 101
[30] *Ibid,* 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana warga Bulan Bintang berkewjiban mempedomani syari'at Islam untuk membangun Negara.[31]

Dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara warga Partai Bulan Bintang memperjuangkan tegaknya tatanan masyarakat yang menjadi cita-cita Islam. Setiap masalah yang dihadapi bersama wajib dipecahkan secara musyawarah yang berlandaskan hikmah dan kebijaksanaan serta senantiasa memohon petunjuk dari Allah SWT.

Musyawarah dikembangkan dari prinsip Syura yang menjadi ciri-ciri umat beriman dan merupakan amanat Allah SWT supaya pihak-pihak yang berwenang dalam masyarakat dan negara menegakkan permasalahan dengan musyawarah bersama rakyat.[32]

Sebagaimana diterangkan dalam as-Syura ayat 38:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya : *"Dan urusan di antara mereka (diputuskan dan ditetapkan) berdasarkan musyawarah di antara mereka"*[33]

Juga firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 sebagai berikut:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya : *"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (kepentingan bersama)"*[34]

---

[31] *Ibid*, 102
[32] *Ibid*, 103
[33] Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 968
[34] *Ibid*, 128-129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Islam dan Negara dalam Pandangan Partai Bulan Bintang

Tujuan utama dari ajaran Islam adalah untuk menarik *maslahat* (kebaikan) dan menolak *mafsadat* (kerusakan). Maslahat dan mafsadat ini dapat dirumuskan dalam *darūri* (sesuatu yang wajib ada), *hajiy* (dilakukan karena ada keperluan) dan *tahsīni* (sesuatu yang menjadikan syari'at ini lebih indah dan sempurna). Implementasi dari tujuan Islam tercermin dalam keharusan *hifz* (memelihara) ajaran ini dalam berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah maupun mu'amalah yang meliputi *hifzun al-dīn* (memelihara agama), *hifzun an-nafs* (memelihara jiwa), *hifzun al-māl* (memelihara harta) dan *hifzun al-'aql* (memelihara akal).[35]

Atas dasar dan prinsip-prinsip tujuan Islam inilah Partai Bulan Bintang berdiri dan atas dasar ini pula Partai bersama-sama dengan komponen bangsa berpartisipasi untuk membangun negara. Prinsip dan tujuan ini pula yang menjadi landasan perkataan, gerakan, khittah dan aktivitas politik Partai Bulan Bintang.[36]

Pandangan Partai Bulan Bintang (PBB) terhadap keberadaan agama dalam sebuah negara berlandaskan dari kemajemukan masyarakat dan bangsa Indonesia. kemajemukan tersebut tidak diperlukan kemudian timbulnya konflik dan permusuhan antar warga negara, akan tetapi kemajemukan tersebut mengharuskan kepada seluruh warga Patai Bulan

[35] Tafsir Azas PBB, Jakarta: DPP PBB, 2005, 77
[36] *Ibid*, 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bintang mencari kesepakatan-kesepakatan bersama dalam melaksanakan kepentingan bersama dan demi mencapai kemaslahatan pula. Dalam sejarah Kesepakatan-kesepakatan itu tertuang dalam naskah yang dinamakan *Piagam Madinah.* Dilihat dari sudt pandang hukum ketatanegaraan kontemporer. *Piagam Madinah* itu hampir setara dengan konstitusi sebuah negara. Piagam inilah yang menjadi cikal bakal perjalanan Rasulullah SAW dalam menghadapi segala tantangan dan dalam berpolitiknya. Dalam Piagam inilah tercantu prinsip-prinsip bernegara secara utuh dan komprehensif.[37]

Keberadaan negara sendiri adalah mutlak harus menjadi alat untuk efektivitas dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh salah satu pimpinan PBB Yusril Ihza Mahendra bahwa islam tidak bisa melepaskan diri dari sejarah bangsa. Para pemimpin Islam berjuang atas nama Islam di Indonesia dan bukan di negara lain. Perjuangan yang mereka lakukan adalah untuk masyarakat dan manusia yang mendiami kawasan ini. Jadi kalau mereka berbicara Islam, itu berarti mereka juga berbicara bangsa.[38]

Partai Bulan Bintang berpedoman seutuhnya pada ajaran Islam, sebuah sistem panduan hidup yang pokok-pokok ajarannya meliputi akidah, syari'ah dan akhlak. Karena itu seluruh aspek perjuangan dengan sikap, ucapan dan

---

[37] *Ibid,* 104

[38] Sahar L.Hasan dkk, *Memilih Partai Islam, Visi, Misi dan Persepsi,* Jakarta: Gema Insani, 1998, 265

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku segenap fungsionaris dan kader partai harus berlandaskan dan berpedoman pada Islam yang prinsip-prinsip ajarannya cukup jelas baik dari al-Qur'an dan Hadiṣ.

Dalam penegakan syari'at Islam di Indonesia, "PBB memperjuangkan sebagaimana yang dicita-citakan Masyumi. Melakukan transformasi syari'at Islam sebagai Undang-undang nasional, dengan pembinaan, perumusan kebijakan ajaran Islam yang universal tanpa mengubah negara Indonesia menjadi negara Islam. Tetapi akan melakukan transformasi ilmu-ilmu Islam yang universal sebagai dasar dan sendi-sendi Negara yang bermartabat" kata Yusril Ihza Mahendra, ketua Majelis Syura PBB saat berkampanye di jl. Notoprawiro Gresik.[39] Ajaran Islam kata Yusril sangat universal dan justru negara-negara barat sebenarnya telah mencuri dan mentransformasikan hukum-hukum syariat Islam diterapkan di negaranya,sehingga mengalahkan Indonesia sebagai Negara penganut Islam terbesar di dunia.

Jadi, posisi negara menurut PBB sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya adalah sebagai alat ataupun kendaraan yang mutlak diperlukan adanya. Karena tanpa adanya negara mustahil manusia dapat merealisasikan tujuannya. Negara adalah alat yang bersifat keduniaan yang selanjutnya menjadi kewajiban bagi warga Bulan Bintang untuk mempedomani syari'at Islam dalam membangun negara.

---

[39] http/Republican.com, 30 Agustus 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Pemikiran M. Natsir Tentang Islam dan Negara

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam pandangan M. Natsir agama dalam pengertian Islam adalah meliputi semua kaidah-kaidah dan muamalah dalam masyarakat menurut garis yang telah ditetapkan oleh Islam. Islam bukanlah semata-mata sebagai agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan akan tetapi Islam mengandung dua unsur, yaitu pertama, hubungan manusia dengan tuhannya *(ḥablun minallah)*, kedua, hubungan manusia dengan sesama *(ḥablun min an-nas)* unsur yang kedua inilah yang meliputi hidup orang-perorangan, kekeluargaan dan hidup kenegaraan.

Dengan demikian, mengenai posisi keberadaan agama dalam sebuah Negara adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa adanya agama (Islam) merupakan pedoman atau pandangan hidup manusia dan sebagai ideologi negara. Karena Islam adalah sebagai ideologi yang mampu membimbing manusia dalam hidupnya di dunia untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Selain itu, dalam kehidupan politik, manusia juga membutuhkan Islam sebagai ideologi Negara. Dengan demikian, seorang muslim tidak mungkin melepaskan keterlibatannya dalam politik tanpa memberi perhatian kepada Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, Islam merupakan suatu ajaran yang lengkap termasuk dalam urusan kebangsaan dan kenegaraan Islam mencakup suatu pengertian yang sangat luas, sama luas dan lengkapnya dengan dimensi kehidupan manusia baik yang berkenaan dengan dunia maupun akhirat. Segala aspek yang terdapat dalam kehidupan dunia dan akhirat di atur oleh ajaran-ajaran Islam.

Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman (Islam) supaya berperilaku secara Islami dalam segala hal. Dan ini pula yang kemudian menjadi dasar bahwa Islam merupakan peraturan pergaulan hidup yang memberi hak sama rasa, memberi kewajiban sama berat atas segenap penduduk alam ini. Peraturan menyangkut budi pekerti, mengurus rumah tangga, mengurus pergaulan dalam negeri, pemerintahan dan kerajaan, perhubungan dengan mereka yang berlainan keyakinan, pertalian dengan mereka yang berlainan negeri, mendidik dan memimpin semangat pencapaian derajat kemanusiaan yang sepenuh-penuhnya. Untuk itu bagi M. Natsir manusia tidak lebih hanya sebagai hamba Allah yang harus mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Kedua, Negara sebagai alat, dalam hal ini Negara didefinisikan adalah suatu institusi yang mempunyai hak, tugas, dan tujuan yang khusus. Institusi dalam arti umum adalah suatu badan, organisasi yang mempunyai tujuan khusus dan dilengkapi alat-alat material dan peraturan-peraturan tersendiri serta diakui oleh masyarakat umum. Disinilah kemudian arti pentingnya bahwa keberadaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara sangat dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupan bersosialisasi dengan sesama. Tanpa adanya negara, maka bisa dibayangkan carut-marutnya kehidupan masyarakat mengingat dalam suatu negara sudah pasti ada aturan-aturan bermasyarakat.

Transformasi praksis mengenai fungsi Negara sebagai alat ini adalah adanya kekuasaan pemaksa untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Sebagai landasan utamanya adalah contoh sunnah rasul. Beliau sebagai Nabi dan negarawan yang telah menunjukkan perlunya menegakkan Negara.

Membentuk sebuah Negara sebagai alat untuk menjalankan hukum-hukum Allah itu tidak terbatas pada zaman rasul saja. Tetapi terus sepanjang zaman. Selama hukum-hukum Allah itu bersifat langgeng (abadi) dan akan tetap terjamin atau terjaga kebenarannya sampai akhir zaman. Suatu negara akan bersifat Islami bukan karena secara formal disebut "Negara Islam" ataupun "berdasarkan Islam", melainkan Negara itu disusun "sesuai ajaran agama Islam" baik dalam teori maupun praktiknya.

Jadi, posisi agama dalam sebuah negara disini menjadi panduan dalam setiap tindakan kongkrit sesuai moral Islami yang harus dilakukan oleh warga negara maupun pemerintah. Karena menurut Natsir negara bukan merupakan tujuan melainkan hanya menjadi alat untuk merealisasikan aturan-aturan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, mekanisme yang dijalankan dalam sebuah Negara diatur pula dalam Islam yaitu musyawarah. Meski menurut M. Natsir sendiri dalam ajaran Islam musyawarah itu tidak selalu identik dengan azas demokrasi. Namun Islam bersifat demokratis dalam arti Islam itu anti istibdad, anti absolutisme dan Islam anti sewenag-wenang.

Pengertian demokrasi dalam Islam adalah memberikan hak kepada rakyat supaya mengkritik, menegur, membetulkan pemerintahan yang dzalim, dan ini merupakan pelaksanaan demokrasi yang ideal. Kalau tidak cukup dengan kritikan dan teguran, Islam sendiri memberikan hak kepada rakyat untuk menghilangkan kedzaliman dengan kekuatan dan kekerasan jika diperlukan.

Demokrasi merupakan prasyarat terbangunnya hubungan baik antara rakyat dengan penguasa, yaitu penguasa atau pemerintah yang adil dengan penuh rasa cinta kepada rakyat dan benar-benar mengabdi terhadap keperluan rakyat lahir maupun bathin. Karena kalau tidak demikian, maka akan menjadi bencana bagi tatanan Negara.

B. Analisis Terhadap Pandangan Partai Bulan Bintang Tentang Islam dan Negara

Beberapa faktor lahirnya ide tentang diperlukannya sebuah partai yang berkarakter Islami terutama yang menjadi cita-cita generasi penerus partai Masyumi untuk meneruskan perjuangannya tanpa ada tekanan dan paksaan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah yaitu *Pertama*, keprihatinan para tokoh-tokohnya terhadap proses kristenisasi di Indonesia.

Kedua, kondisi birokrasi politik, yaitu campur tangan pemerintah dalam kehidupan politik terlalu besar dan melampaui batas. *Ketiga,* diferensiasi yang menyebabkan kesadaran baru bagi umat. Proses modernisasi dan pembangunan juga mempengaruhi perkembangan dan pergeseran pemikiran ideologis seperti cita-cita negara Islam yang ideal kepada gagasan yang sitematik dan rasional, dan *keempat,* konsep politik Islam yang kurang jelas dan kurang lengkap. Tetapi kondisi bangsa Indonesia yang majemuk sangat sulit untuk mewujudkan hal ini. Ada hal-hal yang belum dicakup dalam pemikiran politik Islam. Seperti distribusi kekuasaan, sebagaimana yang dikenal konsep politik modern, sistem pengalihan kekuasaan dan cara pembentukan pemerintahan. Hal ini juga menjadi sebab umat Islam menerima Pancasila sebagai dasar negara ketika Indonesia baru terlahir pada tahun 1945.

Secara garis besar semua pandangan terhadap situasi dan kondisi dalam masyarakat Indonesia baik di bidang ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya, serta apa yang telah menjadi garis politik Partai Bulan Bintang (PBB) tertuang dan terkodifikasi dalam Khittah perjuangan partai.

Partai Bulan Bintang (PBB) memandang bahwa Islam merupakan agama yang diwahyukan untuk ditegakkan sebagai pedoman hidup manusia di dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu sepanjang eksistensinya, hidup manusia merupakan perjuangan menegakkan Islam di manapun berada.

Dalam menentukan sebuah pilihan pedoman hidup, manusia diberikan kebebasan seluas-luasnya. Karena pada dasarnya pilihan-pilihan setiap pribadi itu harus pula berdasarkan pada keyakinan diri sendiri yang tinggi dan bukan didasarkan atas paksaan dari siapapun sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-qur'an bahwa "*tidak ada paksaan dalam agama*". Individu manusialah yang menentukan baik atau buruknya kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat individu-individu itu hidup dalam masyarakat.

Selain itu Partai Bulan Bintang (PBB) berpendapat bahwa keberadaan Negara adalah berfungsi sebagai alat untuk mencapai cita-cita perjuangan, negara juga memiliki kekuasaan penuh dalam merumuskan kebijakan-kebijakan, melakukan tindakan-tindakan, bahkan memaksakan sesuatu berdasarkan kuasa yang diberikan oleh norma-norma hukum yang berlaku dan dilandasi oleh prinsip keadilan, kejujuran dan kebenaran untuk mengelola kepentingan bersama seluruh umat dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkār*, yakni menegakkan syari'at Islam yang diridhai Allah SWT.

Terwujudnya tatanan masyarakat dalam sebuah negara yang sesuai dengan cita-cita Islam, Partai Bulan Bintang menggunakan mekanisme musyawarah dengan berlandaskan hikmah dan kebijaksanaan serta tidak kalah pentingnya yaitu senantiasa memohon petunjuk dari Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana disinggung dalam al-Qur'an, bahwa musyawarah dikembangkan dari prinsip *Syura* yang menjadi ciri-ciri umat beriman dan merupakan amanat Allah SWT supaya pihak-pihak yang berwenang dalam masyarakat dan negara menegakkan permasalahan dengan musyawarah bersama rakyat.

Mengenai kedudukan agama dan negara ini tidak dapat dipisahkan karena agama di dalamnya mengatur semua aspek kehidupan manusia termasuk masalah politik dan negara. Oleh karena itu, PBB termasuk partai Islam yang mempunyai prinsip *ummatan wassaṭan,* seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa umat Islam itu adalah umat yang pertengahan *(ummatan wasaṭan).* Jadi, Partai Bulan Bintang Insyaallah bersikap moderat dan terbuka seluas-luasnya untuk golongan-golongan dan komponen-komponen bangsa lain. Dalam hal ini kemudian Partai Bulan Bintang dapat dikategorikan dalam kelompok yang menganut paham integralistik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari beberapa uraian di atas, maka perlu dibuat kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Relasi Islam dan negara menurut pemikiran M. Natsir yaitu bahwa keduanya itu diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, dalam artian bahwa agama di dalamnya mengatur semua aspek kehidupan manusia yang lengkap dan sempurna termasuk masalah politik dan ketata-negaraan.
2. Implementasi pemikiran M. Natsir mengenai Islam dan negara yang diterapkan oleh Partai Bulan Bintang yaitu bahwa Islam sebagai pedoman hidup mengandung ajaran-ajaran yang universal meliputi semua kaidah-kaidah dalam masyarakat baik urusan manusia dengan Tuhannya *(hablun minallah)* maupun urusan manusia dengan sesama manusia *(hablun min-annās)*. Negara sebagai alat karena eksistensi negara adalah sebagai institusi yang perlu diciptakan, tanpa adanya negara, mustahil akan dapat merealisasikan tujuan bersama. Negara adalah alat yang bersifat keduniaan di mana warga Partai Bulan Bintang berkewajiban mempedomani ajaran Islam untuk membangun negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran-saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

1. Kepada para akademisi, supaya melakukan pengembangan penelitian lebih jauh terutama mengenai implementasi pemikiran M. Natsir baik tentang Islam dan Negara maupun tentang konsep dakwahnya untuk kepentingan khazanah pengetahuan terhadap masyarakat atas pemikiran tokoh bangsa.
2. Kepada kader-kader Partai Bulan Bintang, supaya semaksimal mungkin menerapkan konsep politik M. Natsir dalam kehidupan kongkrit berbangsa dan bernegara guna membangun dan mewujudkan demokrasi sejati di negeri kita tercinta ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Syafii Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan,* Jakarta: LP3ES, 1985

Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir,* Jakarta: Teraju, 2002

Abu Zahra, *Politik Demi Tuhan,* Bandung: Pustaka Hidayah, 1999

A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewargaan*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000

Deliar Noer, *Gerakan Modern Islamdi Indonesia 1900-1942,* Jakarta: LP3ES, 1982

Deliar Noer, *Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa,* Bandung: Mizan, 2001

Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942,* Jakarta: LP3ES, 1996

Dede Rosyada, *Pendidikan Kewargaan* (*Civic Education: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*), Jakarta: ICCE Syarif Hidayatullah, 2003

Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern Dan Postmodern Islam,* Jakarta: Grasido, 2003

Kholid Novianto Al Chaidar, *Era Baru: Sosialisasi Pemikiran Amin Rais, Hamzah Haz, Matori Abdul Jalil, Nurmahmudi, Yuzril Ihza Mahendra,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

M. Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 2001

M. Natsir, *Kebudayaan Islam dalam Perspektif Sejarah,* Jakarta: Giri Mukti Pasaka, 1988

Musa Kazhim dan Alfia Hamzah, *5 Partai Dalam Timbangan: Analisis dan Prospek,* Bandung: Pustaka Hidayah, 1999

Thohir Luth, *M. Natsir, Dakwah Dan Pemikirannya* Jakarta: Gema Insani, 1999

Sahar L. Hasan, Kuat Sukardiono, Dadi MH, *Memilih Partai Islam Visi, Misi Dan Persepsi,* Jakarta: Gema Insani, 1998

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudirman teba, *Islam Orde Baru,* Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1993

Yusuf, A. Puar, *M. Natsir 70 Tahun Kenang-Kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, Jakarta: Antara, 1978

Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto,* Jakarta: LP3ES, 2003

Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, *Hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang,* Jakarta, 2005

Jeje Abdul Rozak, *Agama Dan Kekuasaan,* dalam Jurnal IAIN Sunan Ampel, Edisi XII, 1998

Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia,* Jakarta: PT. Sari Agung, 2002

http/Republican.com, 30 Agustus 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id